

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**RANCANG BANGUN APLIKASI KONTROL PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Tahun 2 dari rencana 2 tahun**

KETUA/ ANGGOTA TIM

Tajuddin Abdillah, S.Kom., M.Cs (Ketua)

NIDN 0008127805

Mohamad Syafri Tuloli, ST., MT (Anggota)

NIDN 0025078202

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
SEPTEMBER 2014**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan

: Rancang Bangun Aplikasi Kontrol Pengelolaan Keuangan Desa

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap

: TAJUDDIN ABDILLAH, S.Kom., M.Cs

NIDN

: 0008127805

Jabatan Fungsional

: Lektor

Program Studi

: Manajemen Informatika

Nomor HP

: 08124466687

Alamat surel (e-mail)

: tajuddin@ung.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap

: Moh. Syafri Tuloli ST, MT.

NIDN

: 0025078202

Perguruan Tinggi

: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Institusi Mitra (jika ada)

Nama institusi Mitra

:

Alamat

:

Penanggung Jawab

:

Tahun Pelaksanaan

: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Biaya Tahun Berjalan

: Rp. 45.000.000,00

Biaya Keseluruhan

: Rp. 95.000.000,00



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Teknik

(Dr. Khavival Hoesan, MT)

NIP/NIK 196404271994032001

Gorontalo, 16-09-2014,

Ketua,

(TAJUDDIN ABDILLAH S.Kom., M.Cs)

NIP/NIK 197812082003121002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

(Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si)

NIP/NIK 196912091993032001

RINGKASAN

Administrasi penggunaan keuangan desa akan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Dalam hal pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo, masalah yang dihadapi saat ini adalah (1) sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya bukti fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain); (2) Lambatnya pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus turun langsung ke desa-desa, sehingga memperlambat pembuatan laporan hasil pemeriksaan; (3) sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan material dan administratif; (4) tidak tersedianya data desa yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat.

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah pemeriksaan secara *online* pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gorontalo. Target khusus untuk penelitian ini adalah teridentifikasinya data hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, sehingga warehouse data hasil pengelolaan keuangan desa dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang dipakai adalah pengumpulan data, studi literatur, analisa sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe sistem, pemaparan prototipe aplikasi, penyempurnaan aplikasi, pembuatan laporan akhir hasil penelitian.

Kata Kunci : *pemeriksaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, tindak lanjut temuan, temuan administratif dan material*

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kemajuan Penelitian BOPTN Skim Hibah Bersaing dengan judul Rancang bangun aplikasi kontrol pengelolaan keuangan desa.

Adapun Laporan Kemajuan Penelitian tentang aplikasi kontrol pengelolaan keuangan desa ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penyelesaian laporan ini. Pada laopran ini masih banyak yang harus diperbaiki terutama arsitektur dan aplikasi yang telah dibuat yang nantinya penyempurnaan tersebut akan dilakukan pada saat pembuatan laporan akhir, Untuk itu kami tidak lupa menyampaikan bayak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pengumpulan data sampai pembuatan laporan ini.

Namun tidak lepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki laporan ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari laporan ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Gorontalo, September 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman pengesahan	1
Ringkasan.....	2
Prakata.....	3
Daftar isi.....	4
Daftar tabel.....	5
Daftar gambar	6
BAB 1. PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Pendukung	9
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah/Desa.....	9
2.1.2 Pengertian Web	10
2.1.3 Pengertian PHP	11
2.1.4 Hypertext Markup Language (HTML)	12
2.2 Acuan Primer dan Peta Jalan Penelitian.....	12
2.2.1 Acuan Primer	12
2.2.2 Peta Jalan Penelitian.....	12
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
3.1 Tujuan Penelitian	14
3.2 Manfaat Penelitian	14
BAB 4. METODE PENELITIAN	16
4.1 Metode Penelitian Tahun I.....	16
4.2 Metode Penelitian Tahun II (Terakhir)	19
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	22
5.1 Hasil Penelitian Tahun I.....	26
5.2 Hasil Penelitian Tahun II	31
5.2.1 Analisa Sistem.....	32
A Analisa Sistem Berjalan.....	33
a. Diagram konteks	34
b. Bagan berjenjang	34
c. DFD level 0.....	35
B Hasil rekayasa proses pemeriksaan inspektorat.....	35
a. Arsitektur sistem	37
b. Flow chart dokumen sistem yang diusulkan.....	38
c. Diagram konteks sistem yang diusulkan.....	39
d. DFD level 0 sistem yang diusulkan	40
5.2.2 Implementasi Program Aplikasi.....	41
5.3 Perbandingan Hasil Penelitian Tahun I dan II	43
BAB 6. KESIMPULANDAN SARAN	44
6.1 Kesimpulan	44
6.2 Saran	44
Daftar Pustaka.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Perbandingan sistem lama dan baru	43
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian.....	24
Gambar 4.2 <i>Fishbone diagram</i> untuk tahapan penelitian	25
Gambar 5.1 Tampilan form login.....	26
Gambar 5.2 Form input data kecamatan	26
Gambar 5.3 Form input data desa	27
Gambar 5.4 Form input data uraian kegiatan	27
Gambar 5.5 Penambahan uraian kegiatan oleh desa	28
Gambar 5.6 Form input anggaran RAPBDes.....	28
Gambar 5.7 Tampilan form penggunaan anggaran	29
Gambar 5.8 Tampilan informasi persetujuan RAPBDes	29
Gambar 5.9 Tampilan aplikasi administrasi pengguna aplikasi.....	30
Gambar 5.10 <i>Report</i> buku kas umum.....	30
Gambar 5.11 <i>Report</i> buku kas harian pembantu	31
Gambar 5.12 <i>Report</i> buku kas pembantu penerimaan	31
Gambar 5.13 <i>Report</i> buku kas pembantu pengeluaran.....	31
Gambar 5.14 Analisa Sistem Berjalan	33
Gambar 5.15 Diagram kontek sistem yang berjalan	34
Gambar 5.16 Diagram berjenjang sistem yang berjalan	34
Gambar 5.17 DFD Level 0 sistem yang berjalan	35
Gambar 5.18 Arsitektur system.....	37
Gambar 5.19 Flow chart dokumen sistem yang diusulkan	38
Gambar 5.20 Diagram konteks sistem yang diusulkan	39
Gambar 5.21 DFD level 0 sistem yang diusulkan.....	40
Gambar 5.22 Form KKP	41
Gambar 5.23 Form Review	41
Gambar 5.24 Laporan akhir hasil review	42
Gambar 5.25 Laporan P2HP	42

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan model pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini yakni berupa kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban sudah menggunakan aplikasi yang telah dibuat pada penelitian tahap pertama. Pemeriksaan/ evaluasi dan pengawasan hasil penggunaan keuangan desa masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo (selaku pihak yang diberi wewenang dalam hal pengawasan aparatur pemerintah daerah) dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya bukti fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain). Kehilangan ini disebabkan oleh bukti tersebut masih diarsipkan secara manual oleh pihak desa. Masalah berikutnya adalah lambatnya pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus turun langsung ke desa-desa (jarak antar desa yang satu dengan lainnya berjauhan, sehingga waktu pemeriksaan lebih banyak dihabiskan untuk berkunjung ke masing-masing desa), akibatnya pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang harus dibuat oleh inspektorat sering terlambat. Masalah lain adalah sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan material dan administratif. Masalah terakhir adalah tidak tersedianya data desa yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pihak desa dalam mengelola/ menyimpan bukti fisik (nota, kwitansi, dan lain sebagainya) secara elektronik sehingga pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat melakukan pemeriksaan secara *online* atas pengelolaan/ penggunaan keuangan desa demi terciptanya suatu prinsip akuntabilitas keuangan daerah secara lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Keberhasilan pengelolaan Anggaran Dana Desa sangat tergantung pada kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan dilapangan, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang benar – benardapat

memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa saat ini?
2. Apa saja yang harus disiapkan oleh desa dalam menghadapi pemeriksaan oleh pihak Inspektorat?
3. Bagaimana model pemeriksaan penggunaan keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo saat ini?
4. Bagaimana pembuatan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak inspektorat?
5. Bagaimana rancangan arsitektur aplikasi yang dapat diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web untuk penyimpanan bukti fisik penggunaan keuangan secara elektronik?
6. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat digunakan untuk memeriksa penggunaan keuangan desa secara *online* oleh pihak inspektorat?

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pendukung

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah/Desa

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik, istilah otonomi desa lebih menekankan kepada aturan normatif, dimana desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Secara perspektif hukum dan politik pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada “struktur” pemerintahan desa, berbeda dengan pendekatan dalam perspektif sosial-ekonomi yang lebih menekankan pada “kultur” komunitas atau masyarakat desa.

Pemahaman tentang otonomi daerah berawal dari pemahaman tentang konsep local government, yang memiliki dua arti. Pertama adalah pemerintah yang seluruh bagian-bagiannya merupakan hasil penunjukan dan bertanggung jawab hanya pada pemerintah pusat. Kedua, adalah pemerintah lokal yang secara bebas dipilih, merupakan subjek bagi supremasi pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk membuat dan sekaligus mengimplementasikan keputusan tanpa kontrol ketat dari pemerintah atasnya.

Secara teoritik pemahaman tentang otonomi daerah pada dasarnya memang tidak bisa terlepas dari pemahaman tentang desentralisasi. Pada umumnya konsep desentralisasi dipahami dari dua perspektif, yaitu politik dan administrasi. Dari perspektif politik, desentralisasi didefinisikan sebagai devolution of power dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal atau daerah. Adapun dari perspektif administrasi, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang untuk mengambil keputusan, perencanaan dan pengaturan fungsi publik (public function) dari pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi, kepada pemerintah dan organisasi non pemerintah yang berada pada jenjang yang lebih rendah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan

desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun, (Permendagri No. 37).

2.1.2 Pengertian Web

Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di dalam World Wide Web (WWW) di dalam internet. Sebuah halaman web biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup Language), yang selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu sebuah protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser.

Halaman-halaman dari website dapat diakses melalui sebuah URL yang biasanya disebut Homepage. URL ini mengatur halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan.

2.1.3 Pengertian PHP

Hypertext PreProcessor atau dikenal dengan nama PHP merupakan salah satu aplikasi server yang sangat banyak digunakan sampai sekarang karena kemudahan dan keandalan yang dimilikinya. PHP pada mulanya dikembangkan hanya untuk mengantisipasi penggunaan database, namun kemudian dikembangkan menjadi aplikasi yang telah memiliki banyak fitur dalam mengembangkan aplikasi non database.

PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data dinamis. Artinya, iya dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini (Kadir, 2009). Misalnya bisa menampilkan isi database kehalaman web. Pada prinsipnya PHP mempunyai fungsi yang sama dengan skrip-skrip ASP (Active Server page), Cold Fusion ataupun Pearl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya bisa dipakai secara command line, artinya skrip PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web server maupun browser. Kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks sambil jalan. PHP dikatakan sebagai sebuah server-side embedded script language artinya sintaks-sintaks dan perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan pada halaman HTML biasa (Sudarmanto, 2008). Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara keseluruhan dijalankan di server.

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain adalah :

- Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.
- Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah.
- Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.
- Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang banyak.
- PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.

2.1.4 *Hypertext Markup Language (HTML)*

HTML adalah bahasa standar untuk membuat tampilan web. HTML merupakan file teks yang terdiri dari tag-tag markup yang biasa digunakan dalam semua file-file yang berjalan diatas web browser. Atau dengan kata lain, HTML merupakan serangkaian konstruksi standar yang dapat membangun halaman web.

HTML merupakan pengembangan dari standar pemformatan dokumen teks, yaitu Standard Generalized markup Language (SGML). Halaman web ditulis dalam format HTML. HTML adalah plain text yang berisi HTML tags dan user-defined text fields. Plain text dapat dibuat dengan menggunakan Notepad, WordPad (Windows 95/98), Simple Text (Macintosh), Vi or pico (UNIX). Adapun untuk aplikasi pembangun HTML terdiri dari MS-FrontPage, Macromedia Dream Weaver, EditPlus, Adobe Golive, dll.

2.2 **Acuan Primer dan Peta Jalan Penelitian**

2.2.1 *Acuan Primer*

a. *Penelitian terdahulu*

Penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa** (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) oleh Agus Subroto, Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2009. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan

kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

2. **Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*** (Studi pada pemerintah Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep) oleh Astri Furqani, Tesis Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Kalimook desa di kecamatan-kecamatan Kalianget Sumenep. Dari hasil penelitian tentang manajemen keuangan dari Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat rendah karena karena tanggung jawab tidak melibatkan masyarakat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa / Badan Permusyawaratan Desa). Dari hasil penelitian disarankan bahwa setiap proses manajemen keuangan desa dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab. Juga diperlukan keterlibatan aktif dari masyarakat desa dan kebutuhan untuk kembali sosialisasi Kalimook dan pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

b. Penelitian saat ini (tahun 2014)

Penelitian yang direncanakan untuk dilakukan saat ini adalah **Membangun sebuah aplikasi berbasis web** yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh Permendagri Nomor 37/2007 dan rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa).

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Mempelajari cara pertanggung jawaban dan persiapan yang harus dilakukan oleh desa dalam rangka menghadapi pemeriksaan pihak Inspektorat
2. Mengidentifikasi dan menganalisis proses pemeriksaan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis data hasil pemeriksaanyang dibuat oleh pihak inspektorat.
4. Mempelajari format dan cara pembuatan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa
5. Merancangarsitektur sistem kemudianmengimplementasikannya dalam sebuah aplikasi berbasis web untuk penyimpanan bukti fisik secara elektronik dan pemeriksaan secara *online*.
6. Menguji aplikasiyang sudah dibuat untuk mendapatkan sebuah aplikasi yang bebas dari *error* dan sesuai dengan keinginan pemakai

3.2 Manfaat Penelitian

Pada umumnya bukti fisik penggunaan keuangan desa diarsipkan secara manual kemudian dibukukan dalam bentuk laporan oleh pihak desa. Saat proses pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo, bukti fisik tersebut sering hilang atau rusak, akibatnya desa kesulitan dalam mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan desa, kesulitan pertanggung jawaban ini berdampak pada hasil temuan inspektorat (berupa temuan material dan administratif. Pada penelitian ini akan dibuat sebuah aplikasi yang dapat melakukan input data bukti fisik penggunaan keuangan secara *on-line* oleh desa kemudian diperiksa secara *online* oleh pihak Inspektorat. Proses pemeriksaan oleh pihak inspektorat akan menyesuaikan bukti fisik dengan perencanaan dan penggunaan keuangan desa yang telah dikomputerisasi pada penelitian pada tahap pertama (Tahun 1). Antara desa dan Inspektorat memiliki tampilan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya dalam pengolahan keuangan desa. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan aplikasi ini adalah memungkinkan data disimpan secara elektronik sehingga

meminimalkan penggunaan kertas. Keuntungan lainnya dengan aplikasi yang akan dibuat adalah pencarian data dan kontrol terhadap penggunaan keuangan desa dapat dilakukan dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keuntungan terakhir yang didapatkan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah desa adalah teroptimalkan penggunaan komputer bantuan pemerintah kepada setiap desa (dengan aplikasi pengontrolan pengelolaan keuangan desa maka penggunaan komputer yang selama ini hanya digunakan untuk mengetik surat menyurat dapat dioptimalkan penggunaannya).

BAB 4. METODE PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian Tahun I

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu tinjauan pustaka, analisa kelemahan, kebutuhan dan kelayakan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe aplikasi, pengujian prototipe aplikasi, implementasi dan sosialisasi serta evaluasi, pelatihan penggunaan aplikasi kepada pemakai. Penjabaran dari langkah-langkah penelitian tersebut yaitu :

1. **Pengumpulan data**, langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mendapatkan data tentang :

- Model pengelola keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
- Cara pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa
- Cara melakukan verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
- Bentuk/ format berbagai macam laporan pertanggung jawaban keuangan yang di buat oleh setiap Desa.

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan survei ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan Kantor Desa. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya data tentang berbagai kegiatan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terkumpulnya data pengelolaan dan penggunaan keuangan desa, diketahuinya cara pembuatan rencana kerja pembangunan (RKP) yang ada didesa, diketahuinya cara melakukan verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), diperolehnya bentuk/ format berbagai macam laporan pertanggung jawaban keuangan yang di buat oleh setiap Desa serta teridentifikasinya permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem lama (sistem yang berjalan saat ini)

2. **Studi literatur**, untuk menemukan filosofis dan teori-teori mengenai implementasi sistem, model aplikasi berbasis web, perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, serta untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan - permasalahan yang sering muncul dalam implementasi sistem.

Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya daftar permasalahan dan teknik-teknik pemecahan terhadap permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya permasalahan-permasalahan dan teknik-teknik pemecahan permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.

3. **Analisa sistem**, untuk melakukan analisis kelemahan pada sistem pengelolaan keuangan yang telah ada, analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi untuk pengembangan sistem. Keluaran dari tahapan ini adalah data rencana kerja desa, sistem pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini, daftar kebutuhan dan kelayakan dalam pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang lama, daftar rencana kerja pembangunan yang ada di desa, analisis terhadap hasil verifikasi data rencana kerja pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), cara pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan yang harus dibuat oleh desa, serta kebutuhan dan kelayakan terhadap pengembangan sistem pengelolaan keuangan desa.

4. **Perancangan sistem**, Dalam melakukan perancangan sistem ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni :

- a. Identifikasi kebutuhan sistem

Pada sub tahapan ini dideskripsikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kebutuhan sistem ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem yang baru. Keluaran dari tahapan ini adalah pendefinisian kemampuan yang harus dimiliki oleh aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah:

- Terciptanya arsitektur sistem yang baru
- Teridentifikasinya input dan output sistem

- b. Pemodelan aplikasi *server* dan *client* menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)*

Aktivitas yang dilakukan oleh kantor desa adalah melakukan entri data Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa dan Kantor BPMD melakukan verifikasi.

Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi, yang menyatakan hubungan interaksi antara sistem dan pengguna. Keluaran dari tahapan ini adalah model komunikasi pengguna dengan aplikasi yang ada di Kantor Desa dan BPMD. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah tergambarannya komunikasi antara pemakai dengan aplikasi menggunakan *Data Flow Diagram (DFD)*

c. Perancangan basis data

Pada tahap ini akan diidentifikasi kebutuhan basis data selanjutnya digambarkan model *Entity Relationship Diagram (ERD)*. Keluaran dari tahapan ini adalah teridentifikasinya tabel-tabel yang dibutuhkan oleh aplikasi sesuai kebutuhan organisasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasi proses bisnis dan tergambarannya model *Entity Relationship Diagram (ERD)*

d. Perancangan antar muka (*interface*) aplikasi *server* dan *client*

Pada sisi input aplikasi *client* rancangan *interface* dalam bentuk *form* dan pada sisi output dalam bentuk tampilan laporan. Rancangan yang dilakukan dalam tahap ini terbatas pada *form* dan rancangan laporan. Keluaran dari tahapan ini adalah tergambarannya rancangan *form* dan output (laporan). Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya :

- Desain tampilan (*interface*) untuk aplikasi yang digunakan oleh Kantor Desa dan Kantor BPMD
- Rangan output sistem (laporan)

5. **Pembuatan prototipe aplikasi**, pada tahap ini akan dibuat prototipe aplikasi pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini merupakan implemetasi hasil rancangan ke dalam bahasa program. Keluaran dari tahapan ini adalah terciptanya protipe aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya sebuah prototipe aplikasi pengelolaan keuangan desa baik input maupun output yang digunakan oleh pihak Kantor Desa dan Kantor BPMD.
6. **Pengujian prototipe aplikasi**, pada tahap ini akan dilakukan pengujian prototipe aplikasi yang telah dibuat. Keluaran dari tahapan ini adalah terujinya prototipe aplikasi yang telah dibuat sehingga aplikasi benar-benar terbebas dari kesalahan

logika. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya prototipe aplikasi yang telah diuji dengan baik.

7. **Pemaparan prototipe aplikasi**, tahap ini akan dipaparkan prototipe aplikasi ke operator/ pegawai Kantor Desa dan BPMD. Tahap ini ditujukan untuk mendapatkan informasi/ koreksi/ masukan/ perbaikan aplikasi dari pihak pemakai (operator/ pegawai Kantor Desa dan BPMD). Keluaran dari tahap ini adalah informasi dari pihak pemakai berupa koreksi/ masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis dan keinginan dari pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah daftar koreksi aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis).
8. **Penyempurnaan aplikasi**, Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan aplikasi yang telah dibuatkan prototipenya berdasarkan masukan dan koreksi dari pemakai. Keluaran dari tahap ini adalah aplikasi yang sudah sesuai dengan proses bisnis dan keinginan pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis) dan keinginan pemakai.
9. **Pemaparan hasil perbaikan aplikasi**, Pada tahap ini aplikasi yang sudah diperbaiki akan dikonsultasikan lagi dengan pihak Kantor Desa dan Kantor BPMD. Keluaran dari tahapan ini adalah terkonsultasikannya hasil perbaikan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah telah dipaparkannya hasil perbaikan aplikasi ke Kantor Desa dan Kantor BPMD.
10. **Pembuatan laporan**
Tahap akhir dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pembuatan laporan akhir penelitian dan dipublikasikannya hasil penelitian. Keluaran dari tahap ini adalah laporan akhir dan proceedings. Target atau indikator keberhasilan adalah tercetaknya laporan akhir penelitian dan hasil penelitian telah dipublikasi.

4.2 Metode Penelitian Tahun II (Terakhir)

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu tinjauan pustaka, analisa kelemahan, kebutuhan dan kelayakan sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe aplikasi, pengujian prototipe aplikasi, pembuatan laporan akhir untuk hasil penelitian. Penjabaran dari langkah-langkah penelitian tersebut yaitu :

1. **Pengumpulan data**, langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah mendapatkan data tentang :

- Model pertanggung jawaban keuangan desa (pembuatan laporan pertanggung jawaban beserta lampiran bukti fisiknya) yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.
- Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh desa dalam menghadapi pemeriksaan oleh pihak Inspektorat.
- Model pemeriksaan penggunaan keuangan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo
- Bentuk/ format berbagai macam laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh pihak inspektorat.

Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan survei ke Kantor Inspektorat dan Kantor Desa. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya data tentang berbagai kegiatan dalam hal pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa, model pemeriksaan, dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terkumpulnya data tentang pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa dan bentuk laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat

2. **Studi literatur**, untuk menemukan filosofis dan teori-teori mengenai implementasi sistem, model aplikasi berbasis web, perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, serta untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam implementasi sistem. Keluaran dari tahapan ini adalah diperolehnya daftar permasalahan dan teknik-teknik pemecahan terhadap permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya permasalahan-permasalahan dan teknik-teknik pemecahan permasalahan dalam implementasi sistem untuk pengelolaan dan penggunaan keuangan desa.

3. **Analisa sistem**, untuk melakukan analisis kelemahan pada sistem peratanggung jawaban penggunaan keuangandes dan cara pemeriksaan inspektorat yang telah ada, analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi untuk pengembangan sistem. Keluaran

dari tahapan ini adalah data bukti fisik penggunaan keuangan desa, sistem pemeriksaan penggunaan keuangan desa yang ada saat ini, daftar kebutuhan dan kelayakan dalam pengembangan sistem pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah teridentifikasinya kelemahan dalam sistem pertanggung jawaban penggunaan keuangan dan cara pemeriksaan yang lama, analisis terhadap hasil pemeriksaan, cara pembuatan laporan hasil pemeriksaan oleh inspektorat.

4. **Perancangan sistem**, Dalam melakukan perancangan sistem ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni :

e. Identifikasi kebutuhan sistem

Pada sub tahapan ini dideskripsikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kebutuhan sistem ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem yang baru. Keluaran dari tahapan ini adalah pendefinisian kemampuan yang harus dimiliki oleh aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah:

- Terciptanya arsitektur sistem yang baru
- Teridentifikasinya input dan output sistem

f. Pemodelan aplikasi *server* dan *client* menggunakan *Unified Modeling Language* (UML)

Aktivitas yang dilakukan oleh kantor desa adalah melakukan entri data bukti fisik dan pemeriksaan oleh pihak inspektorat. Diagram ini menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh aplikasi, yang menyatakan hubungan interaksi antara sistem dan pengguna. Keluaran dari tahapan ini adalah model komunikasi pengguna dengan aplikasi yang ada di Kantor Desa dan inspektorat. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah tergambarannya komunikasi antara pemakai dengan aplikasi menggunakan *Unified Modeling Language* (UML)

g. Perancangan basis data

Pada tahap ini akan diidentifikasi kebutuhan basis data selanjutnya digambarkan model *Entity Relationship Diagram* (ERD). Keluaran dari tahapan ini adalah teridentifikasinya tabel-tabel yang dibutuhkan oleh aplikasi sesuai kebutuhan organisasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah

teridentifikasi proses bisnis dan tergambarkannya model *Entity Relationship Diagram* (ERD)

h. Perancangan antar muka (*interface*) aplikasi *server* dan *client*

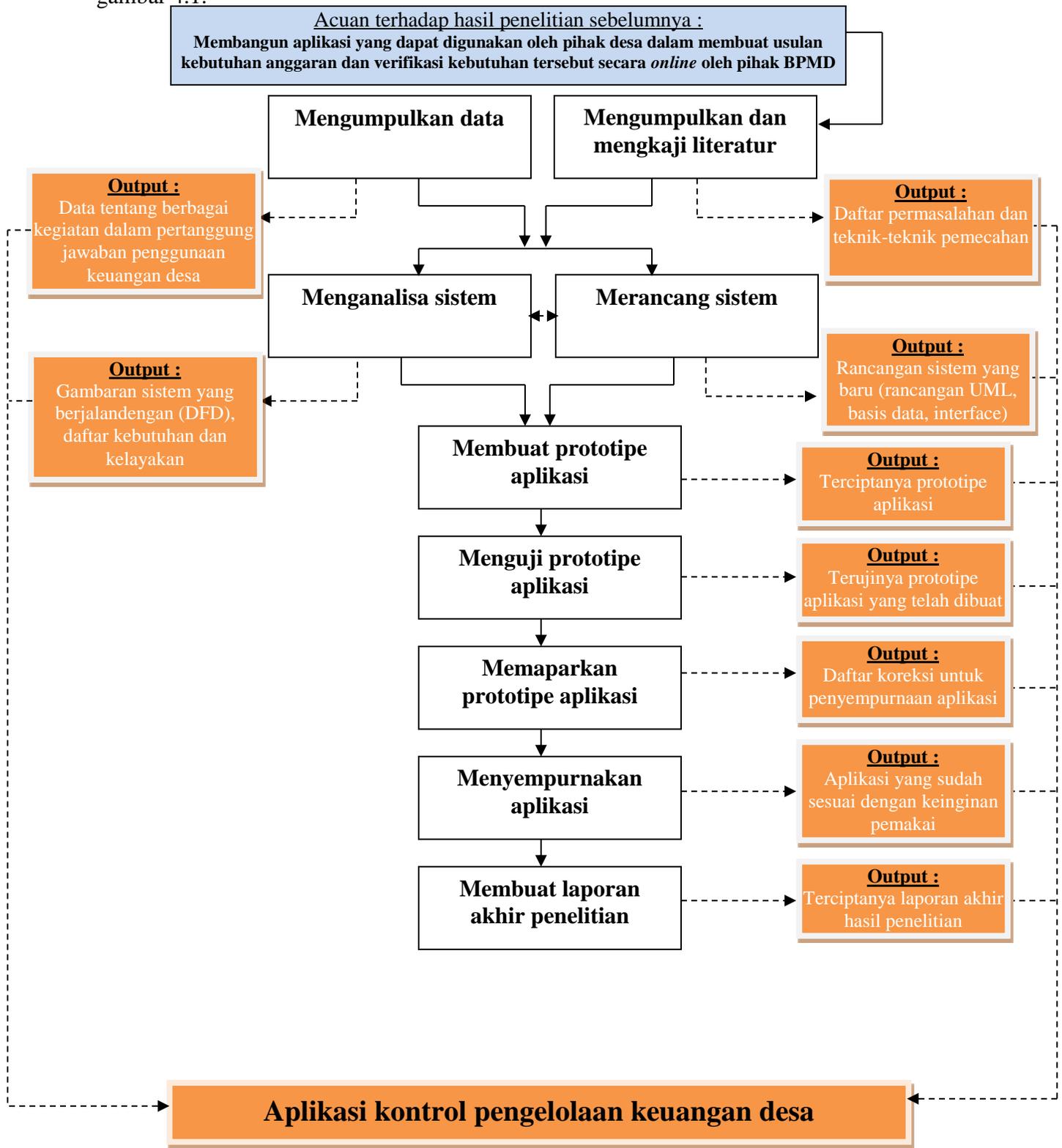
Pada sisi input aplikasi *client* rancangan *interface* dalam bentuk *form* dan pada sisi output dalam bentuk tampilan laporan. Rancangan yang dilakukan dalam tahap ini terbatas pada *form* dan rancangan laporan. Keluaran dari tahapan ini adalah tergambarkannya rancangan *form* dan output (laporan). Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya :

- Desain tampilan (*interface*) untuk aplikasi yang digunakan oleh Kantor Desa dan inspektorat
- Rangan output sistem (laporan)

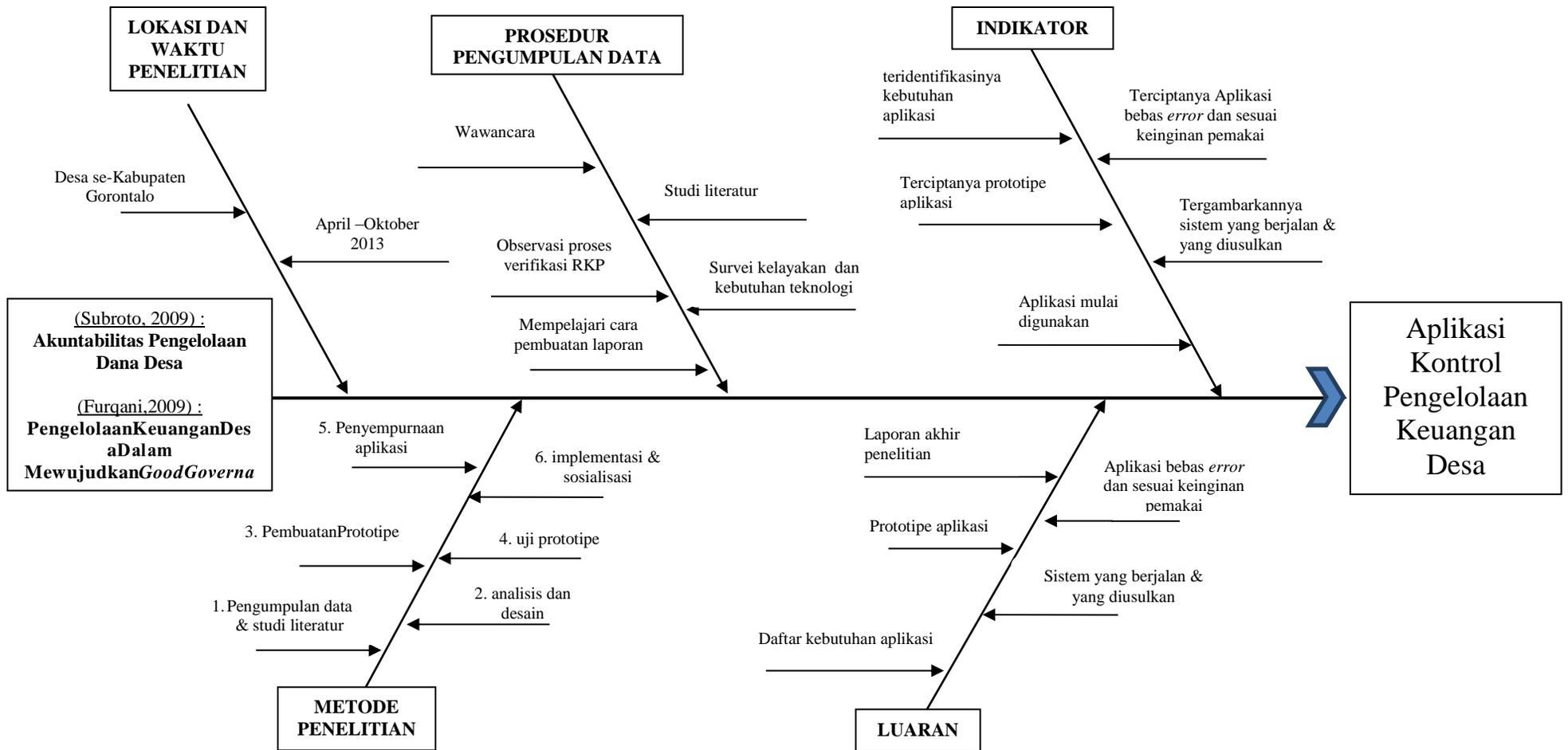
5. **Pembuatan prototipe aplikasi**, pada tahap ini akan dibuat prototipe aplikasi pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa. Tahapan ini merupakan implemetasi hasil rancangan ke dalam bahasa program. Keluaran dari tahapan ini adalah terciptanya protipe aplikasi. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya sebuah prototipe aplikasi pertanggung jawaban penggunaan keuangan desa baik input maupun output yang digunakan oleh pihak Kantor Desa dan inspektorat.
6. **Pengujian prototipe aplikasi**, pada tahap ini akan dilakukan pengujian prototipe aplikasi yang telah dibuat. Keluaran dari tahapan ini adalah terujinya prototipe aplikasi yang telah dibuat sehingga aplikasi benar-benar terbebas dari kesalahan logika. Target atau indikator keberhasilan pada tahap ini adalah terwujudnya prototipe aplikasi yang telah diuji dengan baik.
7. **Pemaparan prototipe aplikasi**, tahap ini akan dipaparkan prototipe aplikasi ke operator/ pegawai Kantor Desa dan Inspektorat. Tahap ini ditujukan untuk mendapatkan informasi/ koreksi/ masukan/ perbaikan aplikasi dari pihak pemakai (operator/ pegawai Kantor Desa dan Inspektorat). Keluaran dari tahap ini adalah infromasi dari pihak pemakai berupa koreksi/ masukan untuk perbaikan/ penyempurnaan aplikasi yang sesuai dengan proses bisnis dan keinginan dari pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah daftar koreksi aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis).

8. **Penyempurnaan aplikasi,** Pada tahap ini akan dilakukan penyempurnaan aplikasi yang telah dibuatkan prototipenya berdasarkan masukan dan koreksi dari pemakai. Keluaran dari tahap ini adalah aplikasi yang sudah sesuai dengan proses bisnis dan keinginan pemakai. Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya aplikasi yang sesuai kebutuhan organisasi (proses bisnis) dan keinginan pemakai.
9. **Pembuatan laporan penelitian,** pada tahap ini akan dilakukan pembuatan laporan hasil penelitian. Keluaran dari tahap ini adalah laporan akhir penelitian. Target atau indikator keberhasilan adalah terciptanya laporan akhir penelitian

Penjabaran langkah-langkah penelitian dalam bentuk bagan ditampilkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Bagan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian



Gambar 4.2 Fishbone diagram untuk tahapan penelitian

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian Tahun I

Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa dimulai dari login terhadap aplikasi tersebut. Login dibagi menjadi 3 yakni :

- Login untuk kantor BPMD (input data kode rekening dan uraian kegiatan serta verifikasi hasil inputan data RAPBDes oleh setiap desa)
- Login untuk kantor desa (input data RAPBDes dan perbaikan hasil verifikasi RAPBDes)
- Login untuk Badan Keuangan (untuk melihat desa mana saja yang sudah disetujui RAPBDesnya dan siap dicairkan anggaran)
- Login untuk admin (persetujuan user yang melakukan registrasi)

Tampilan untuk form login terlihat pada gambar 5.1

The image shows a login form with a red header containing the word "Login". Below the header, there are three input fields: "Username :", "Password :", and "Ketikkan gambar diatas :". The third field contains a small image of a fingerprint. At the bottom of the form, there are two buttons: "Loginkan" and "Register".

Gambar 5.1 Tampilan form login

Aplikasi kantor BPMD dimulai dengan melakukan input data kecamatan (terlihat pada gambar 5.2), input data desa (terlihat pada gambar 5.3), input uraian kegiatan (terlihat pada gambar 5.4)

The image shows a screenshot of the application interface. At the top, there is a header with the logo and text "APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN GORONTALO". Below the header is a navigation menu with items: Home, Anggaran Item, Proposal Status, Data, About, and Contact. The main content area is divided into two sections. The left section is titled "Profile" and shows a profile picture and user information: Nama: bpmd, Jenis: bkmd, and a "Lihat detail" button. The right section is titled "Tambah kecamatan" and contains a form with a "Tutup Form Kecamatan" button, a "Data Kecamatan" label, and a "Nama kecamatan:" input field. Below the input field are "Tambah" and "Reset" buttons. At the bottom of the right section, there is a "Ubah kecamatan" section with a "Ubah kecamatan" button.

Gambar 5.2 Form input data kecamatan

Gambar 5.3 Form input data desa

Gambar 5.4 Form input data uraian kegiatan

Aplikasi kantor desa dapat melakukan input data RAPBDes melalui menu proposal. RAPBDes dapat dibuat sesuai kebutuhan desa misalnya penambahan uraian kegiatan dapat dilakukan oleh desa (bila uraian kegiatan yang diinput oleh BPMD ada yang tidak sesuai dengan uraian kegiatan didesa maka desa dapat melakukan penambahan uraian kegiatan tersebut). Pada gambar 5.5 menunjukan form untuk menambah uraian kegiatan yang tidak sempat di input oleh BPMD padahal uraian kegiatan tersebut dibutuhkan oleh desa.



Gambar 5.5 Penambahan uraian kegiatan oleh desa

Untuk memasukan (menginput) data RAPBDes terlihat pada gambar 5.6. Pada gambar ini pihak desa akan menginput data jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan



Gambar 5.6 Form input anggran RAPBDes

Bila RAPBDes yang diajukan oleh desa sudah diverifikasi dan disetujui oleh pihak BPMD maka selanjutnya desa dapat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan di RAPBDes berdasarkan uraian kegiatan dan jumlah anggran yang telah disetujui oleh BPMD. Gambar 5.7 menunjukkan form pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Hasil inputan data tersebut akan secara otomatis masuk sebagai laporan (baik untuk buku kas umum, buku kas pembantu harian, buku kas pembantu harisn untuk pendapatan dan pengeluaran)



Gambar 5.7 Tampilan form penggunaan anggaran

Aplikasi yang digunakan oleh Badan Keuangan hanya berfungsi untuk melihat desa mana saja yang RAPBDesnya sudah disetujui oleh pihak BPMD, sehingga dana siap untuk dicairkan. Gambar 5.8 menunjukkan form yang menampilkan informasi desa yang sudah disetujui RAPBDesnya



Gambar 5.8 Tampilan informasi persetujuan RAPBDes

Penggunaan aplikasi ditingkat administrator user seperti tampak pada gambar 5.9. administrator user bertugas untuk menyetujui user yang melakukan registrasi, merubah status user yang sudah terdaftar, dan menghapus user dari aplikasi.



Gambar 5. 9 Tampilan aplikasi administrasi pengguna aplikasi

Hasil penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan oleh pihak desa setiap tahunnya dalam bentuk laporan ke Kantor BPMD. Pelaporan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran). Gambar 5.10 menunjukkan tampilan *report* buku kas umum, Gambar 5.11 menunjukkan tampilan *report* buku kas harian pembantu, Gambar 5.12 menunjukkan tampilan *report* buku kas pembantu penerimaan, Gambar 5.13 menunjukkan tampilan *report* buku kas pembantu pengeluaran

BUKU KAS UMUM
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6
			Saldo buku lalu	0,00	
1	04 June 2013	2.1.1.1	Belanja modal pengadaan alat elektronik		2.200.000,00
2	11 June 2013	1.1.1.2	Hutang Usaha Dari Donor/Dana Desa	2.000.000,00	
3	13 June 2013	1.1.2.1	Tambah Kas Desa	1.400.000,00	
			Jumlah	3.400.000,00	2.200.000,00
			Jumlah Buku ini	3.400.000,00	2.200.000,00
			Jumlah s/d Buku lalu	0,00	0,00
			Jumlah s/d Buku ini	3.400.000,00	2.200.000,00
			Sisa Kas		1.200.000,00
			Pada hari ini 30 June 2013 oleh kami didapat dalam kas Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) Diteliti dan : Tamat Saldo Bank Sesuai Berharga	1.200.000,00	

Gambar 5.10 Report buku kas umum

BUKU KAS HARIAN PEMBANTU
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
		Solusi Dahan lulu	0,00		
1	04 June 2013	Belanja modal perlengkapan alat elektronik	-	2.200.000,00	-2.200.000,00
2	11 June 2013	Hasil Usaha Dari Dataning Desa	2.000.000,00	-	-200.000,00
3	11 June 2013	Tambah Kas Desa	1.400.000,00	-	1.200.000,00
Mengesahkan, KEPALA DESA			Mongolato, 30 June 2013 BENDAHARA DESA		
H. Mawati Orya			Sabrina Usman		

Gambar 5.11 Report buku kas harian pembantu

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENERIMAAN
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NO BUKI PENERIMAAN	TANGGAL SETOR	NO STS DAN BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	2	11 June 2013	mak/01-06-2013/kw	2.000.000,00,00
2	3	13 June 2013	mak/02-06-2013	1.400.000,00,00
Jumlah Dahan ini				1.400.000,00
Jumlah s/d Dahan lalu				0,00
Jumlah s/d Dahan ini				1.400.000,00
Mengesahkan, KEPALA DESA			Mongolato, 30 June 2013 BENDAHARA DESA	
H. Mawati Orya			Sabrina Usman	

Gambar 5.12 Report buku kas pembantu penerimaan

BUKU KAS PEMBANTU
PERINCIAN OBYEK PENGELUARAN
DESA MONGOLATO KECAMATAN TELAGA
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NO BUKI PENGELUARAN	TANGGAL PENGELUARAN	NO SPP DAN BUKTI PENGELUARAN LAINNYA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	1	04 June 2013	K/11-06-2013/Bd1	2.200.000,00
Jumlah Dahan ini				2.200.000,00
Jumlah s/d Dahan lalu				0,00
Jumlah s/d Dahan ini				2.200.000,00
Mengesahkan, KEPALA DESA			Mongolato, 30 June 2013 BENDAHARA DESA	
H. Mawati Orya			Sabrina Usman	

Gambar 5.13 Report buku kas pembantu pengeluaran

5.2 Hasil Penelitian Tahun II

Focus penelitian tahun kedua pada proses pemeriksaan penggunaan keuangan desa. Pada tahun kedua ini, entitas yang terlibat dalam system adalah desa dan inspektorat sebagai pemeriksa keuangan daerah.

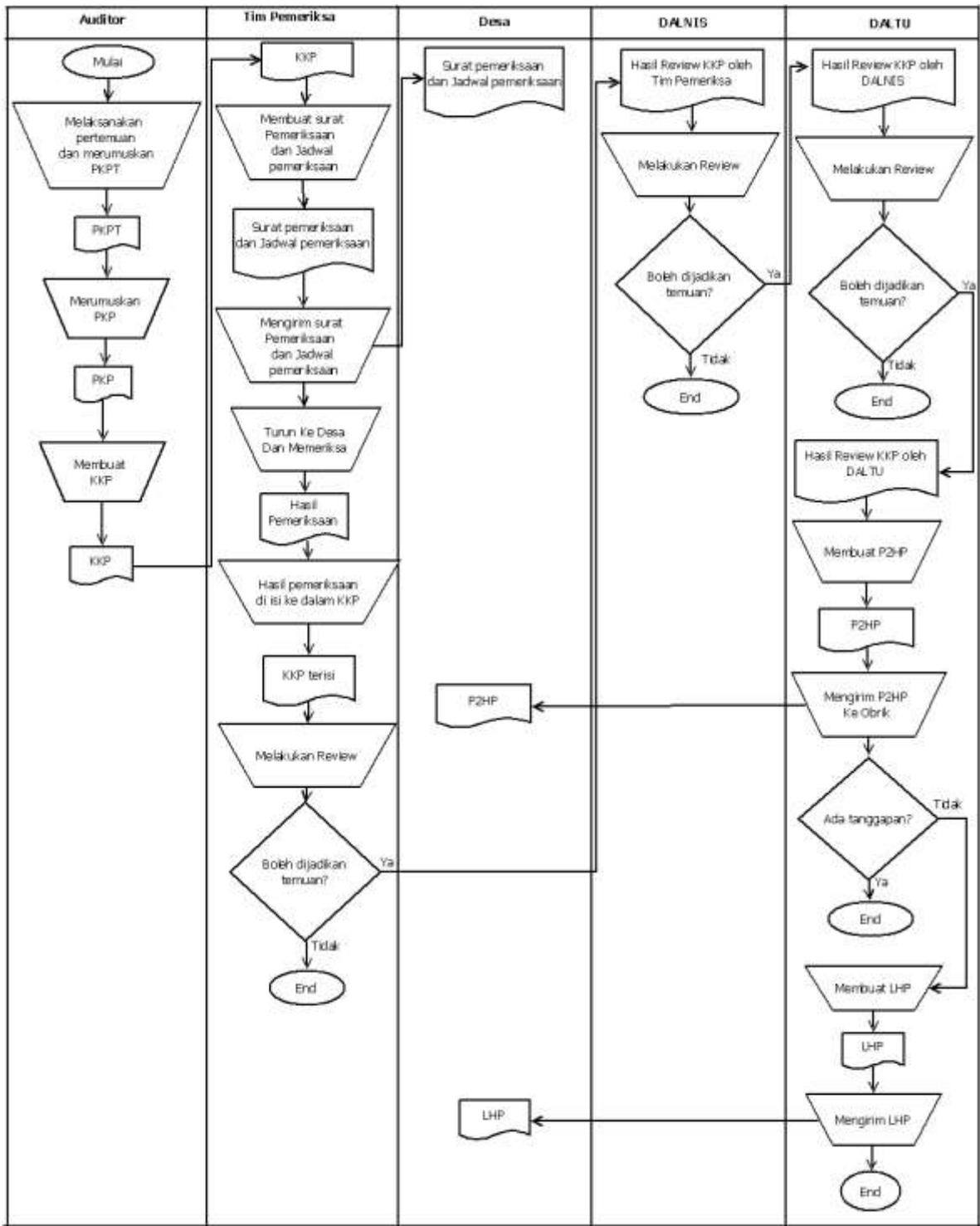
5.2.1. Analisa Sistem

Mekanisme pemeriksaan inspektorat terhadap penggunaan anggaran desa adalah sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai Inspektorat yang terlibat dalam pemeriksaan (sebagai auditor) melaksanakan pertemuan untuk merumuskan PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan)
2. Rumusan PKPT menghasilkan PKP (Program Kerja Pemeriksaan). Rumusan PKP menghasilkan KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan). Setiap 1 auditor memegang 1 KKP.
3. Tim pemeriksa akan mengirimkan surat pemeriksaan dan jadwal pemeriksaan kesetiap desa
4. Tim pemeriksa turun kesetiap desa untuk memeriksa.
5. Hasil pemeriksaan akan di isi kedalam KKP oleh setiap Auditor
6. Hasil isian KKP akan direview oleh Ketua Tim Pemeriksa.
7. Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS (Pengendali Teknis)
8. Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh DALTU (pengendali Mutu) – Kepala Inspektorat
9. Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok Hasil Pemeriksaan)
10. P2HP akan dikirim ke obrik (objek pemeriksaan/ desa yang mendapat temuan) untuk ditanggapi dalam waktu paling lama 2 minggu
Bila dalam 2 minggu tidak ada tanggapan maka akan keluar surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

A. Analisa Sistem Berjalan

Sistem yang saat ini berjalan seperti terlihat pada gambar 5.14

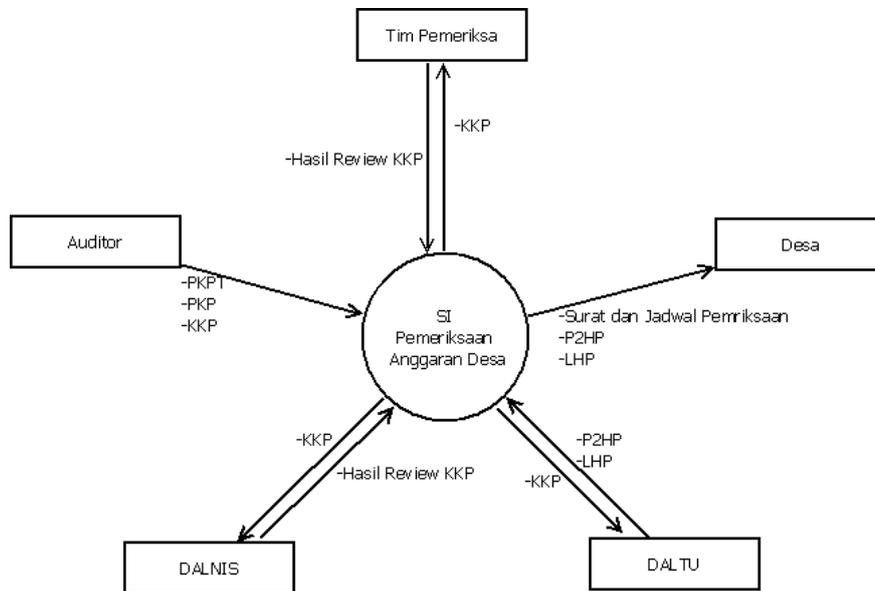


Gambar 5.14 Analisa Sistem Berjalan

Detail proses untuk sistem yang berjalan tergambar dalam Data flow diagram yang ditampilkan pada gambar 5.15

a. Diagram konteks

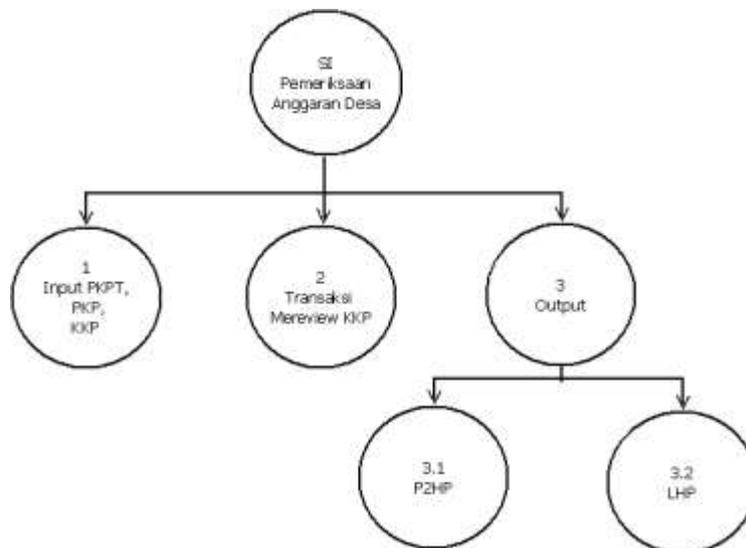
Diagram konteks untuk sistem pemeriksaan inspektorat terhadap penggunaan anggaran desa adalah sebagai berikut :



Gambar 5.15 Diagram konteks sistem yang berjalan

b. Bagan berjenjang

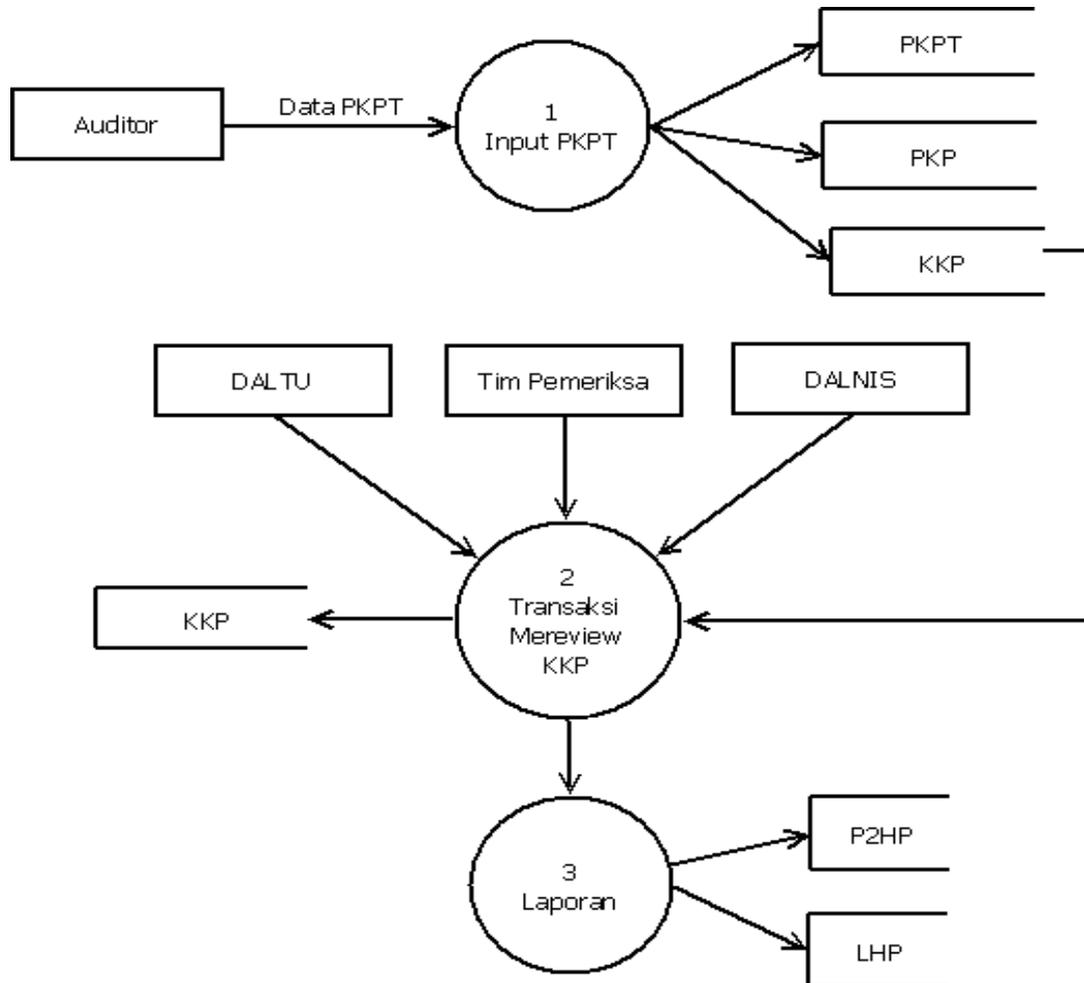
Penjabaran tiap proses yang ada dalam DFD ditampilkan dalam bentuk diagram berjenjang seperti terlihat pada gambar 5.16



Gambar 5.16 Diagram berjenjang sistem yang berjalan

c. DFD level 0

Keterkaitan antar proses yang ada pada diagram berjenjang digambarkan dalam Data Flow Diagram level 0 seperti pada gambar 5.17



Gambar 5.17 DFD Level 0 sistem yang berjalan

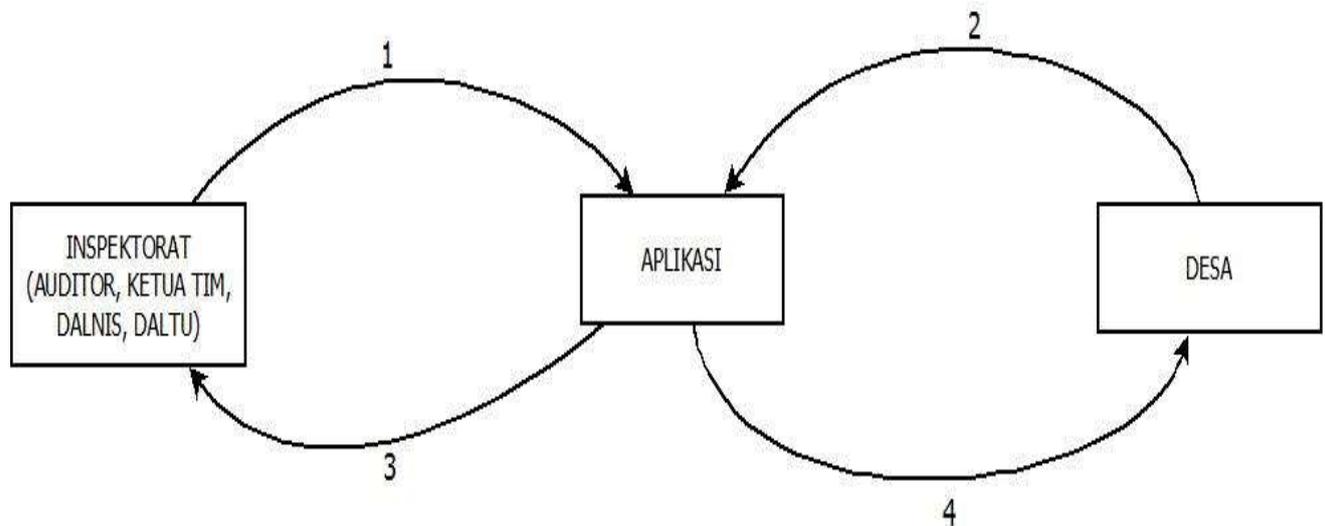
B. Hasil rekayasa proses pemeriksaan inspektorat

Berdasarkan analisa sistem yang telah dibuat pada sub bab 5.2.1 maka sistem lama terdapat masalah dalam hal pengolahan data yang masih manual sehingga pembuatan LHP akan membutuhkan perhitungan untuk masing-masing temuan obrik (desa). Disamping itu juga proses review oleh masing-masing pemeriksa (ketua tim, dalnis, dan daltu) masing menggunakan dokumen secara manual sehingga memungkinkan hilang/ rusaknya dokumen tersebut. Untuk mengotomatisasi proses manual yang ada maka proses yang terjadi selama ini akan dilakukan secara online

melalui aplikasi. Tahapan untuk proses pemeriksaan inspektorat hasil rekayasa sistem :

1. Auditor menginput data anggaran yang di terima setiap desa
2. Seluruh pegawai Inspektorat yang terlibat dalam pemeriksaan (sebagai auditor) melaksanakan pertemuan untuk merumuskan PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan), yang kemudian menghasilkan PKP dan hasil dari PKP yakni KKP
3. Auditor menginput data PKPT, PKP, dan KKP
4. Perwakilan pegawai dari setiap Desa akan memberikan data-data penggunaan anggaran Desa mereka kepada pegawai Inspektorat (Auditor).
5. Pegawai Inspektorat dalam hal ini sebagai auditor memasukkan setiap data yang diberikan oleh masing-masing petugas Desa kedalam KKP.
6. Ketua Tim Pemeriksa akan mereview semua data yang dimasukkan kedalam KKP oleh auditor.
7. Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS (Pengendali Teknis).
8. Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh DALTU (pengendali Mutu) – Kepala Inspektorat
9. Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok Hasil Pemeriksaan) Kemudian P2HP akan dikirimkan kembali oleh auditor kepada Desa yang mendapatkan Temuan melalui sistem, dan Desa akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk menanggapi P2HP tersebut.
10. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Desa tidak memberikan tanggapan terhadap P2HP yang diberikan maka Kepala Inspektorat melalui auditor akan mengeluarkan surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).

a. Arsitektur sistem



Gambar 5.18 Arsitektur sistem

KET DOKUMEN:

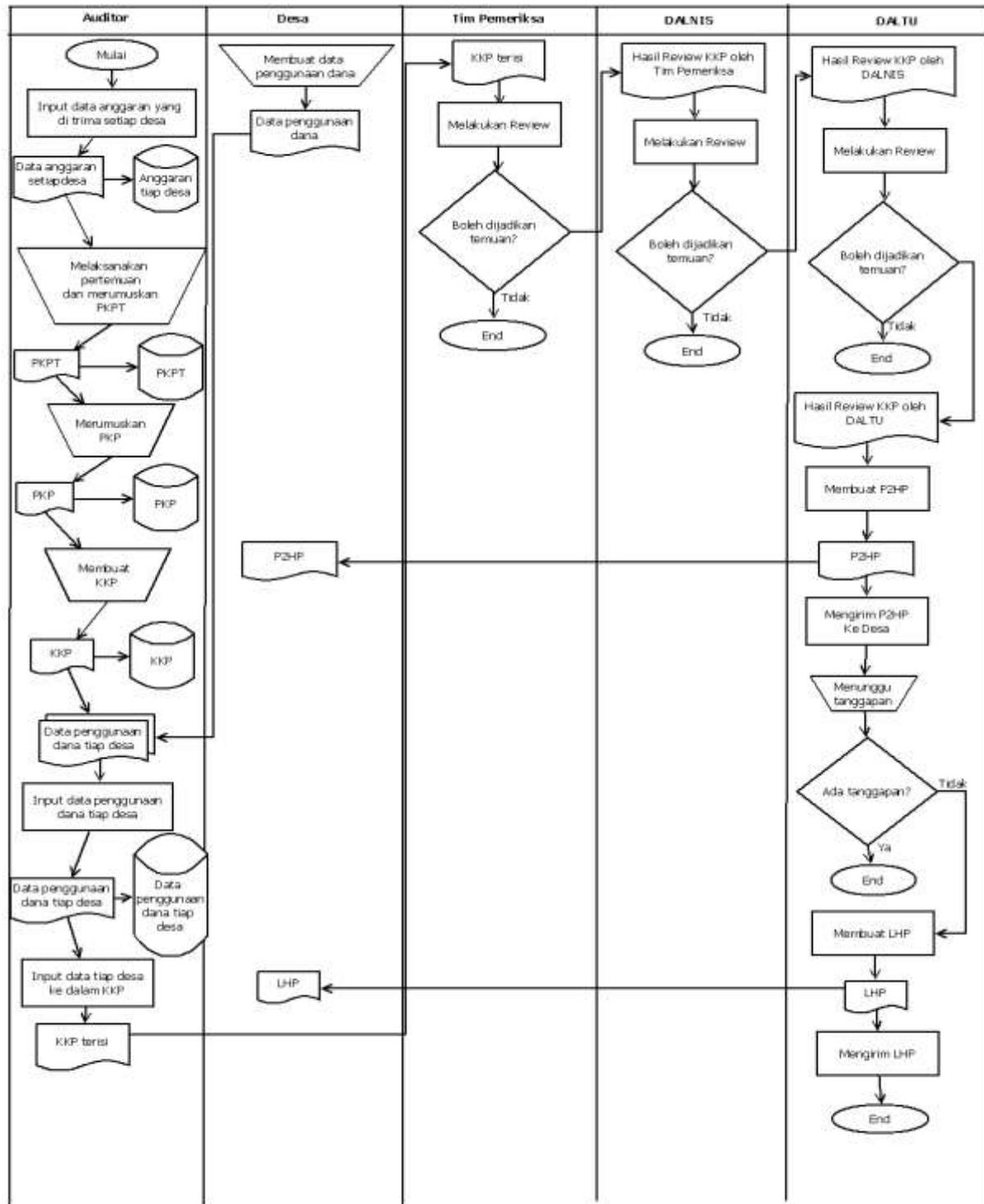
1. Data desa, data anggaran yang diberikan kepada masing-masing desa, data PKPT, PKP, KKP, hasil review.
2. Data penggunaan anggaran desa, P2HP.
3. review data dari desa.
4. LHP.

KET GAMBAR

1. Proses ini menggambarkan proses input data desa, data anggaran yang diberikan kepada masing-masing desa, data PKPT, dan KKP oleh pegawai inspektorat.
2. Proses ini menggambarkan proses input data penggunaan anggaran desa oleh perwakilan desa.
3. Proses ini menggambarkan hasil inputan data dari desa akan direview kembali dan akan dimasukkan lagi kedalam aplikasi (kembali ke proses 1).
4. Proses ini menggambarkan hasil review yang berupa temuan oleh inspektorat dapat dilihat kembali oleh desa dan desa dapat melakukan perbaikan dengan menginputkan kembali P2HP (kembali ke proses 2).

b. Flow chart dokumen sistem yang diusulkan

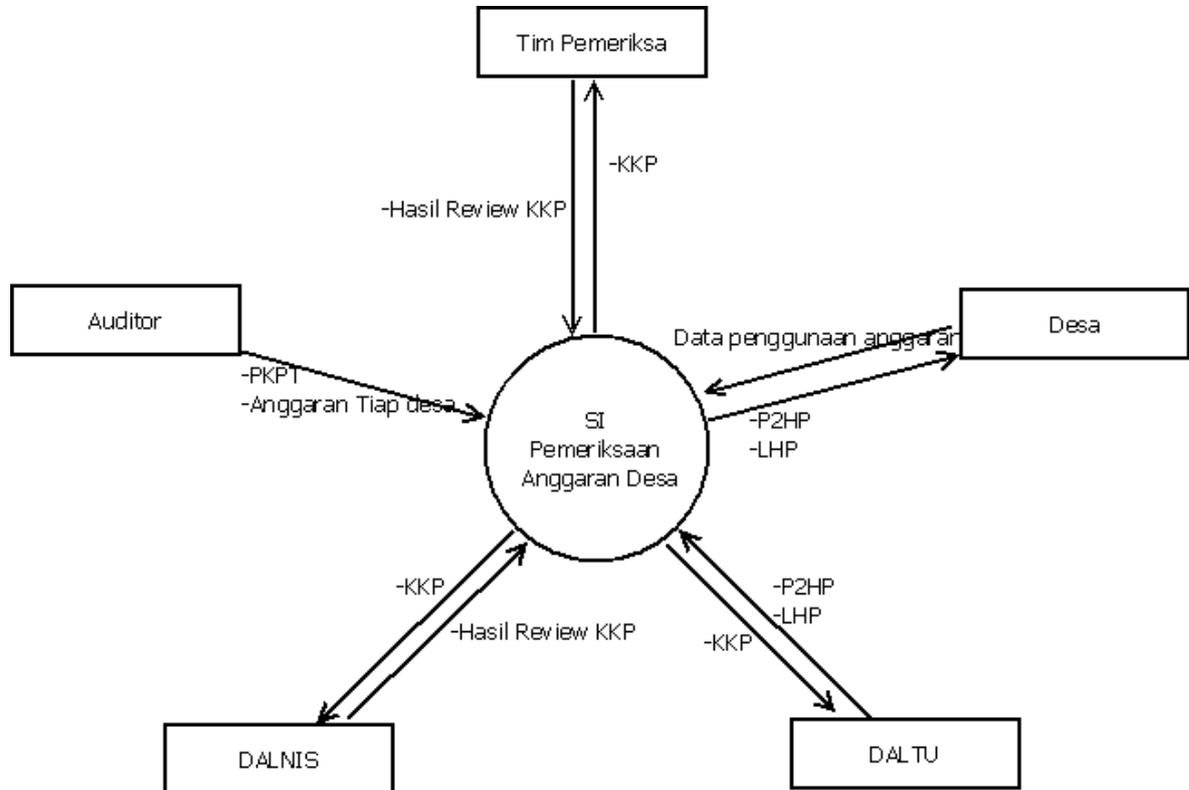
Penggambaran tentang flowchart dokumen untuk sistem yang diusulkan adalah terlihat pada gambar 5.19



Gambar 5.19 Flow chart dokumen sistem yang diusulkan

c. Diagram konteks sistem yang diusulkan

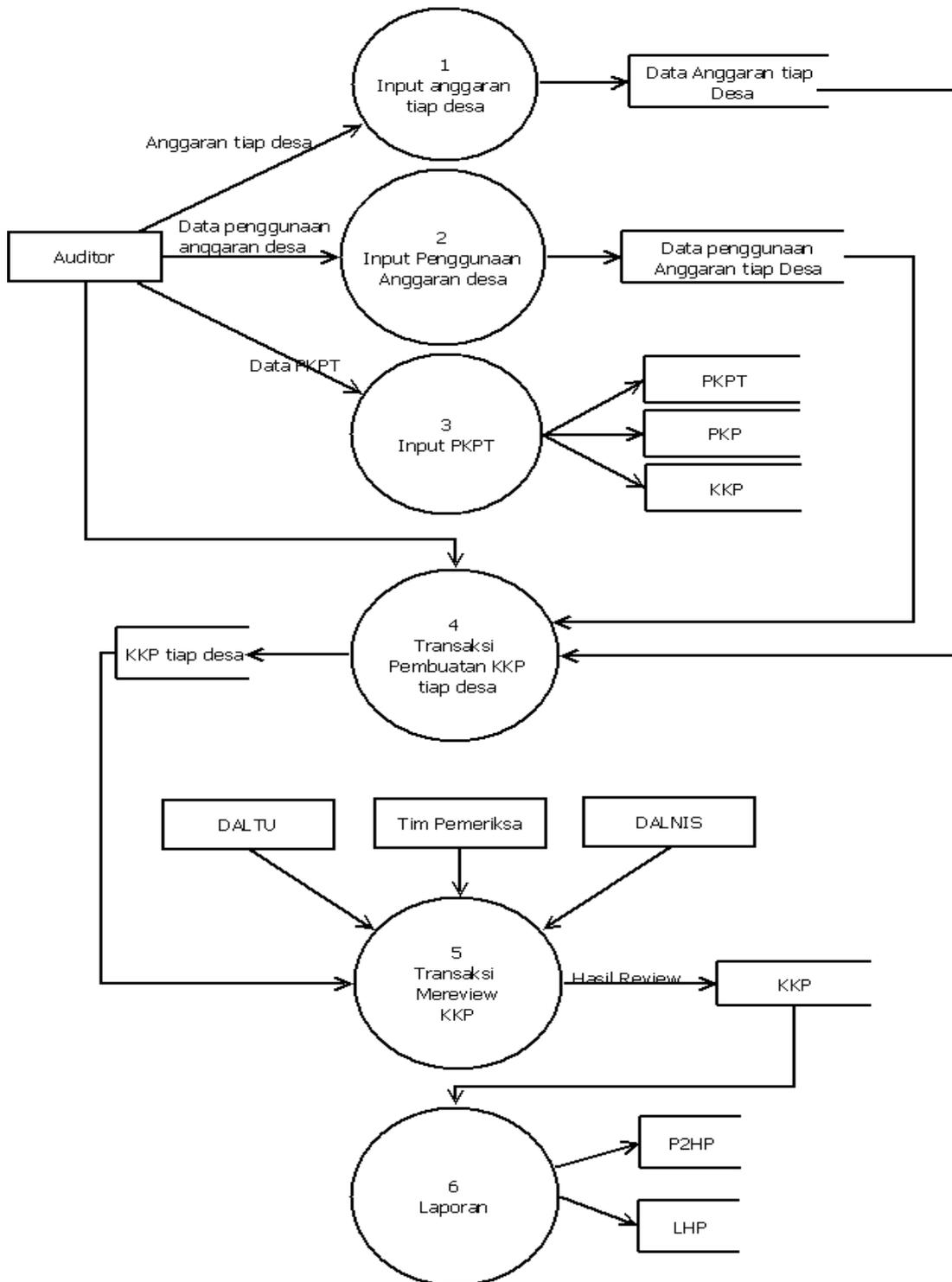
Diagram konteks sistem yang diusulkan untuk pemeriksaan inspektorat terhadap penggunaan anggaran desa ditampilkan pada gambar 5.20



Gambar 5.20 Diagram konteks sistem yang diusulkan

d. DFD level 0 sistem yang diusulkan

Detail proses pada gambar diagram konteks terlihat pada gambar 5.21



Gambar 5.21 DFD level 0 sistem yang diusulkan

5.2.2. Implementasi Program Aplikasi

Penggunaan keuangan desa akan diaudit oleh Inspektorat, dimana pihak inspektorat akan menginput data hasil pemeriksaan melalui form Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Gambar 5.22 menunjukkan form untuk input data Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Edit KKP tahun 2012 Kecamatan Limboto

biyonga

1. dutulanaa | temuan atas tidak adanya kwitansi perbaikan komputer
2. dutulanaa | Kwitansi pembayaran kursi tamu tidak disertai bukti pembayaran pajak
3. biyonga | Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala desa

Gambar 5.22 Form KKP

Hasil inputan KKP kemudian akan direview oleh ketua tim, dalnis, dan daltu. Form review terlihat pada gambar 5.23. Pada tahap ini ketua tim, dalnis dan daltu diberikan hak untuk mengeliminasi hasil temuan dengan cara mengklik kotak yang tersedia pada temuan.

Ketua Tim Edit KKP tahun 2012 Kecamatan Limboto

1. dutulanaa | temuan atas tidak adanya kwitansi perbaikan komputer | 1 Hapus
2. dutulanaa | Kwitansi pembayaran kursi tamu tidak disertai bukti pembayaran pajak | 2 Hapus
3. biyonga | Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala desa | 3 Hapus

Ketua Tim Edit KKP tahun 2012 Kecamatan Limboto

1. dutulanaa | temuan atas tidak adanya kwitansi perbaikan komputer | 1 Hapus
2. dutulanaa | Kwitansi pembayaran kursi tamu tidak disertai bukti pembayaran pajak | 2 Hapus
3. biyonga | Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala desa | 3 Hapus

Gambar 5.23 Form Review

Setelah proses review maka desa akan menindak lanjuti hasil temuan yang dituangkan dalam bentuk P2HP. Adapun laporan akhir hasil review (dilakukan oleh

Pengendali Mutu/ daltu) ditampilkan pada gambar 5.24 dan gambar 5.25 menunjukkan P2HP

LAPORAN HASIL REVIEW

Kertas Kerja Pemeriksaan

Tanggal 13/08/2014

Tingkat : Daltu

No	Nama Desa	Hasil Pemeriksaan	Ket
1	dujanaa	ternyata star tidak adanya kurban perbaikan kompi-ster	
2	dujanaa	Kwitansi pembayaran iuran tani tidak disertai bukti pembayaran pajak	Ditentukan Ekstus Tim
3	byonga	Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala desa	

Reviewer
(Daltu)

Dr. Abd. Manaf Duggo, M.Si
NIP. 197302261992031

Gambar 5.24 Laporan akhir hasil review

Desa Lihai PPHP tahun 2012 Kecamatan Telaga

[Lihat](#)

1. Tambah Paragraf hapus

Bagian Keuangan

+kol	+bar	Nama Desa	edit	+kol	-kol	Bukti Kurang Lengkap	edit	+kol	-kol	Kelebihan Pembayaran Tunjangan	edit
		mongoloto	edit			200000	edit				edit
		Bulila	edit				edit			20000	edit

desa	Tanggapan	Bukti	Inspektorat
mongoloto	Ini bukti yang diminta	Lihat Gambar	<input checked="" type="checkbox"/> Batal Ke LHP <input type="checkbox"/> Ok Batal ke LHP <input type="button" value="Kirim tanggapan"/>
Bulila		Tidak ada	<input type="checkbox"/> Batal Ke LHP <input type="button" value="Kirim tanggapan"/>

Gambar 5.25 Laporan P2HP

5.3 Perbandingan Hasil Penelitian Tahun I dan II

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka perbandingan hasil penelitian untuk tahun I dan II dapat dilihat pada table 5.1

NO	PENELITIAN TAHUN I		PENELITIAN TAHUN II	
	Sistem Lama	Hasil rekayasa	Sistem Lama	Hasil rekayasa
1	Pencarian data usulan (RAPBDes) untuk tahun sebelumnya memakan waktu lama	Memudahkan pencarian data karena sistem yang baru memungkinkan mencari data dengan aplikasi	Pembuatan KKP oleh auditor memakan waktu lama dan mudah rusak sehingga memungkinkan hilangnya hasil pemeriksaan	KKP tersimpan secara digital sehingga meminimalkan kerusakan data
2	Penggunaan dana untuk setiap kegiatan kurang terdata dengan baik sehingga penggunaan keuangan sering mengalami kesalahan	Aplikasi dapat mengatur penggunaan dana untuk setiap kegiatan (sesuai perencanaan awal)	Koreksi hasil pemeriksaan masih dilakukan manual sehingga memungkinkan kesalahan dalam hal review	Lebih cepat dalam melakukan review
3	Kemanan data kurang terjamin	Aplikasi dapat melakukan proteksi untuk uraian kegiatan	Lambatnya pembuatan P2HP dan LHP karena harus melakukan perhitungan waktu temuan secara manual	Secara otomatis (hitungan waktu dilakukan oleh system) saat mengalihkan temuan dari P2HP ke LHP

BAB 6. KESIMPULANDAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa dan kantor inspektorat serta pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Sistem Informasi yang dibangun pada system audit keuangan desa dapat menggantikan proses pemeriksaan keuangan desa secara manual sehingga dapat mempercepat proses pemeriksaan penggunaan keuangan desa.
2. Dengan menggunakan Sistem Informasi pemeriksaan keuangan desa ini laporan pertanggungjawaban anggaran lebih cepat karena adanya kontrol penggunaan anggaran secara online.

6.2 Saran

Setelah melakukan penelitian yang dilakukan pada Kantor Desa, beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan peningkatan pekerjaan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur terhadap penguasaan teknologi komputer secara merata sehingga tidak terpusat pada satu orang saja.
2. Perlunya peningkatan fasilitas komputer untuk menunjang ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinasn.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana. A dan Suntoro. E, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Furqani. A, 2009, *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* (Studi pada pemerintah Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep), *Tesis*, Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya
- [Http://www.berdikarionline.com/opini/20121001/kemandirian-pemerintahan-desadan-urgensi-uu-desa.html#ixzz2H40uZKrW](http://www.berdikarionline.com/opini/20121001/kemandirian-pemerintahan-desadan-urgensi-uu-desa.html#ixzz2H40uZKrW), diakses tanggal : 4 Januari 2013 pukul 14.30 Wita
- Kadir. A, 2009, *Mastering Ajax dan PHP*, Andi Offset, Yogyakarta
- Permendagri No.37, 2009, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan/menteri/tahun/2007>
- Subroto. A, 2009, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008), *Tesis*, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Supriyanto. A, 2005, "Pengantar Teknologi Informasi", Salemba Infotek, Jakarta

Lampiran-lampiran :

Lampiran 1. Biodata ketua dan anggota pelaksana penelitian

KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Tajuddin Abdullah, S.Kom., M.Cs
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP	19781208200312 1 002
5	NIDN	00081278
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo 08 Desember 1978
7	E-mail	tajuddin@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	08124466687
9	Alamat Kantor	Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo-Prov Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 - 821125
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 ± 20 Orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Pemrograman Web 2. Data Warehouse 3. Keamanan Komputer 4. Rekayasa Perangkat Lunak 5. Sains Manajemen

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan tinggi	STMIK Manado	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	Manajemen Informatika	Ilmu Komputer
Tahun masuk-lulus	Masuk : 1997 Selesai : 2002	Masuk : 2009 Selesai : 2011
Judul Skripsi/tesis	Aplikasi Pengolahan Data Kepegawaian di Kabupaten Gorontalo	Rancang Bangun Manajemen Transaksi Pada Basis Data Terdistribusi Berbasis Web Service Untuk Aplikasi Musrenbang
Nama pembimbing	Ir. Hans F. Wowor, M.Kom	Dr. Techn. Ahmad Ashari, M.Kom

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi/ Tesis)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp.)
1	2011	Analisis Kesiapan Daerah Di Provinsi Gorontalo Menghadapi Era <i>Information Communication Technology</i> (ICT)	PNBP Fakultas teknik UNG	Rp. 5.000.000
2	2012	Optimalisasi Layanan Pertukaran Data Rencana Kerja Skpd Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Melalui Pembangunan Aplikasi Berbasis Protokol Soap	BOPTN UNG	Rp. 50.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp.)
1	2011	Pelatihan sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tingkat Kelurahan	PNBP Fakultas Teknik UNG	Rp. 5.000.000
2	2012	Pemanfaatan <i>Animation Template</i> pada Teknologi Multimedia Pembelajaran Interaktif bagi Guru	PNBP UNG	Rp. 6.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/ Tahun	Nama Jurnal
1	Rancang Bangun Manajemen Transaksi Berbasis Web Service Untuk Database Terdistribusi	2012	PROCEEDINGS Konferensi Nasional Sistem Informasi STIKOM Bali dengan ISBN 9786029876802
2	Pemanfaatan Algoritma Fuzzy Set Untuk Clustering Anak Tuna Rungu–Wicara	2012	PROSIDING Seminar Nasional Sistem Informasi STMIK Potensi Utama Medan dengan ISSN : 2088-9747
3	Model rencana kerja SKPD melalui Pembangunan aplikasi berbasis Protokol SOAP	2013	PROCEEDINGS Konferensi Nasional Sistem Informasi STMIK Bumigora Mataram dengan ISBN 978-602-17488-0-0

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Konferensi Nasional Sistem Informasi	Rancang Bangun Manajemen Transaksi Berbasis Web Service Untuk Database Terdistribusi	25 Pebruari 2012 di STIKOM Bali
2	Seminar Nasional Sistem Informasi	Pemanfaatan Algoritma Fuzzy Set Untuk Clustering Anak Tuna Rungu–Wicara	19 Oktober 2012 di STMIK Potensi Utama Medan

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

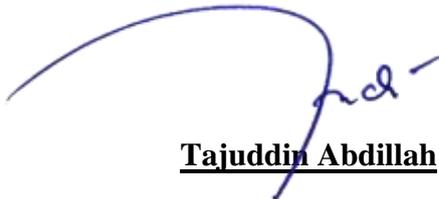
J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

B. No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing

Gorontalo, 16 September 2014
Pengusul,



Tajuddin Abdillah

ANGGOTA PENELITI 1

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Mohamad Syafri Tuloli, ST., MT
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	198207252008121004
5	NIDN	0025078202
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 25 Juli 1982
7	E-mail	ekohabit@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	081314270499
9	Alamat Kantor	Jl. Jend Sudirman No. 6 Kota Gorontalo-Prov Gorontalo
10	Nomor Telepon/Faks	0435 - 821125
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1 =0 Orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1. Algoritma dan Struktur Data 1 dan 2 2. Rekayasa Perangkat Lunak 3. Kecerdasan Buatan 4. Testing dan Implementasi Perangkat Lunak 5. Pemrograman Web 1 dan 2 6. Pemrograman Berorientasi Objek

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan tinggi	Universitas Islam Indonesia	Institut Teknologi Bandung
Bidang Ilmu	Teknik Informatika	Teknik Informatika
Tahun masuk-lulus	2001 – 2005	2005 – 2007
Judul Skripsi/tesis	Pengaturan Tata Letak Barang menggunakan Algoritma Genetika (pendekatan prosedural)	Pengaturan Tata Letak Barang menggunakan Algoritma Genetika (pendekatan object-oriented)
Nama pembimbing	Zainuddin Zukhri, MT	Dr. Oerip S. Santoso, M.Sc

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi/ Tesis)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp.)
1	2011	Pengembangan Konten Lokal Interaktif untuk Pembelajaran	PNBP	21.5
2	2012	Exhaustive Search dengan Distributed Processing untuk Permasalahan Penjadwalan pada Jurusan Teknik Informatika UNG	PNBP	5
3	2012	Aplikasi Pendeteksian Plagiat pada Karya Ilmiah Menggunakan Algoritma Rabin-Karp	BOPTN	35

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jlh (Juta Rp.)
1	2010	Pelatihan Pengenalan Teknologi Informasi Bagi Guru SD Negeri No. 27 Duingingi Kota Gorontalo	Mandiri	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/ Tahun	Nama Jurnal

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
-	-	-	-	-

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

C. No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Bersaing

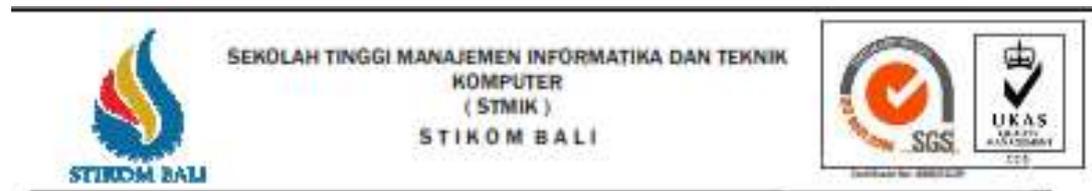
Gorontalo, 16 September 2014

Pengusul,



Moh. Syafri Tuloli

Lampiran 2. Bukti penerimaan paper dan naskah publikasi



SURAT KETERANGAN DITERIMA

Nomor : 63/P2M/STIKOM/WDS/IX/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pelaksana Konferensi Nasional Sistem & Informatika (KNS&I) 2014 menerangkan bahwa :

Kode Makalah : KNS&I-2014 – 053

Nama Penulis : Tajuddin Abdillah, Mohamad Syafri Tuloli

Institusi / Instansi : Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo,
Indonesia.

Judul : RANCANG BANGUN APLIKASI AUDIT
KEUANGAN DESA

Telah melalui proses review dan dinyatakan diterima untuk dipresentasikan pada Konferensi Nasional Sistem & Informatika (KNS&I) 2014 pada tanggal 7 - 8 Nopember 2014. Untuk proses selanjutnya kami persilahkan untuk melakukan revisi berdasarkan hasil review serta melakukan proses pembayaran biaya registrasi pemakalah sebelum tanggal 26 September 2014. Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16 September 2014

Konferensi Nasional Sistem & Informatika (KNS&I) 2014

Ny. Jayanti, M.Kom

Rancangan Bangun Aplikasi Audit Keuangan Desa Dikantor Inspektorat Kabupaten Gorontalo

Tajuddin Abdillah¹, Mohamad Syafri Tuloli²

¹Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, tajuddin@ung.ac.id

²Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, ekohabit@gmail.com

ABSTAK

Administrasi penggunaan keuangan desa akan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Dalam hal pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo, masalah yang dihadapi saat ini adalah (1) sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya bukti fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain); (2) Lambatnya pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus turun langsung ke desa-desa, sehingga memperlambat pembuatan laporan hasil pemeriksaan; (3) sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas temuan material dan administratif; (4) tidak tersedianya data desa yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat.

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah pemeriksaan secara *online* pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menilai pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Gorontalo. Target khusus untuk penelitian ini adalah teridentifikasinya data hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat, sehingga warehouse data hasil pengelolaan keuangan desa dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang dipakai adalah pengumpulan data, studi literatur, analisa sistem, perancangan sistem, pembuatan prototipe sistem, pemaparan prototipe aplikasi, penyempurnaan aplikasi, pembuatan laporan akhir hasil penelitian

Kata Kunci : pemeriksaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, tindak lanjut temuan, temuan administratif dan material

PENGANTAR

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya [1]. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa [2]

Dengan model pengelolaan keuangan desa yang ada saat ini yakni berupa kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah menggunakan aplikasi yang telah dibuat pada penelitian tahap pertama. Pemeriksaan/ evaluasi dan pengawasan hasil penggunaan keuangan desa masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo (selaku pihak yang diberi wewenang dalam hal pengawasan aparatur pemerintah daerah) dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena hilangnya bukti fisik administrasi (kwitansi, nota, dan lain-lain). Kehilangan ini disebabkan oleh bukti tersebut masih diarsipkan secara manual oleh pihak desa. Masalah berikutnya adalah lambatnya pihak Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan keuangan desa karena harus turun langsung ke desa-desa (jarak antar desa yang satu dengan lainnya berjauhan, sehingga waktu pemeriksaan lebih banyak dihabiskan untuk berkunjung ke masing-masing desa), akibatnya pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang harus dibuat oleh inspektorat sering terlambat. Masalah lain adalah sulitnya pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dalam mendata desa yang harus dilakukan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) atas temuan material dan administratif. Masalah terakhir adalah tidak tersedianya data desa yang sudah menindaklanjuti temuan inspektorat. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh pihak desa dalam mengelola/ menyimpan bukti fisik (nota, kwitansi, dan lain sebagainya) secara elektronik sehingga pihak Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat melakukan pemeriksaan secara *online* atas pengelolaan/ penggunaan keuangan desa demi terciptanya suatu prinsip akuntabilitas keuangan daerah secara lebih baik

ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

Pengelolaan keuangan desa diawali dari proses membuat perencanaan yang dituangkan dalam bentuk RAPBDes kemudian dilanjutkan dengan penggunaan anggaran tersebut sampai pada akhirnya pemeriksaan penggunaan keuangan desa oleh inspektorat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan [3].

Kebutuhan Sistem Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Pada sistem lama, penegolaan keuangan desa dimulai dari desa membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes berisi pendapatan dan belanja desa. Pendapatan desa bersumber dari PAD, ADD, dan sumbangan/ hibah pihak ke 3. Kantor BPMD Kabupaten Gorontalo akan memverifikasi RAPBDes tersebut. Hasil perubahan/ verifikasi yang telah dibuat oleh BPMD Kabupaten Gorontalo kemudian akan diperbaiki lagi oleh pihak desa. Hasil Perbaikan yang telah dibuat oleh Desa dimasukan lagi ke BPMD. Bila hasil perbaikan yang dibuat oleh desa sudah sesuai dengan hasil verifikasi sebelumnya maka pihak BPMD Kabupaten Gorontalo akan mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi. Untuk menggunakan/ membelajakan uang tersebut pihak kantor desa harus menyesuaikan dengan usulan APBDes yang telah disetujui oleh Kantor BPMD.

Sistem yang dibangun harus mampu membuat RAPBDes, memverifikasi RAPBDes secara online dan memproteksi uraian kegiatan dan besaran dana RAPBDes saat BPMD menyetujui APBDes. Melaporkan penggunaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran) [4]

Kebutuhan Sistem Audit Keuangan Desa

Pada sistem lama proses audit keuangan desa dimulai dari pemeriksaan penggunaan keuangan desa (hasil audit di tulis pada Kertas Kerja Pemeriksaan). Hasil isian KKP akan direview oleh Ketua Tim Pemeriksa. Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS (Pengendali Teknis). Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh DALTU (pengendali Mutu). Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok Hasil Pemeriksaan)

Sistem yang dibangun harus bisa melakukan pemeriksaan administrasi keuangan secara online dan hasil pemeriksaan di inputkan ke dalam form hasil pemeriksaan. Begitu juga untuk proses review harus dilakukan secara online

Kebutuhan Sistem Tindak Lanjut Hasil Audit

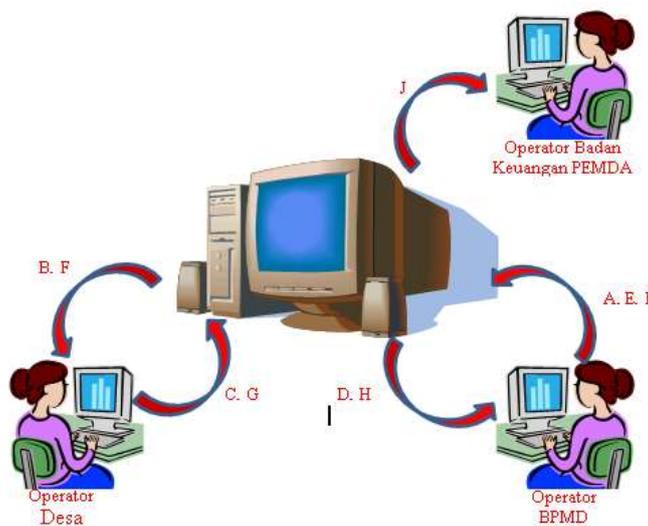
Pada sistem lama tindak lanjut hasil temuan dibuat dalam surat yang dituangkan dalam P2HP (pokok-pokok Hasil Pemeriksaan) untuk dikirimkan ke masing-masing desa melalui Kantor Camat (temuan setiap desa dapat diketahui oleh desa lainnya). Dalam waktu 2 (dua) minggu desa tidak menindak lanjuti hasil temuan maka akan di alihkan ke dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sistem yang dibangun harus bisa melakukan pengecekan secara online tindak lanjut temuan oleh Desa dan secara otomatis mengalihkan P2HP ke LHP dalam waktu 2 minggu apabila desa tidak menindak lanjuti P2HP

RANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM

Kelemahan sistem lama dalam hal pengelolaan keuangan (perencanaan, penggunaan, dan pemeriksaan keuangan desa) masih dilakukan secara manual. Rancangan sistem baru dibuat agar dalam pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi.

Arsitektur sistem yang diusulkan untuk pembuatan kode rekening oleh BPMD dan pembuatan RAPBDes oleh Desa terlihat pada gambar 1



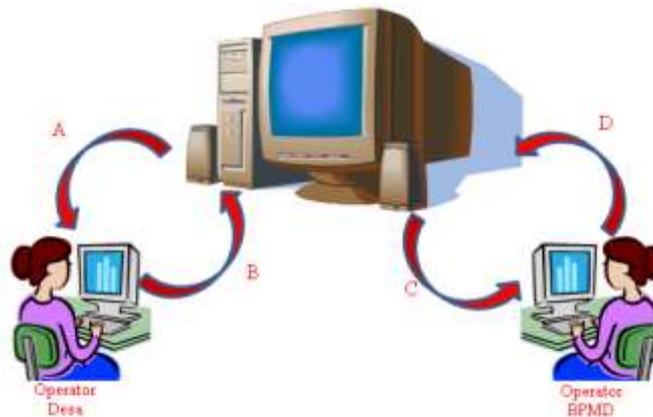
Gambar 1. Pembuatan usulan RAPBDes

Keterangan gambar :

- Operator BPMD melakukan input kode rekening dan uraiannya kemudian mempublish kode rekening tersebut supaya bisa terbaca oleh semua desa
- Operator kantor desa membuat RAPBDes berdasarkan rekening dan uraian yang diinput oleh operator BPMD
- Operator Kantor desa mengirimkan hasil RAPBDes ke BPMD untuk diverifikasi.
- Operator BPMD mengambil data RAPBDes untuk dilakukan verifikasi.
- Operator BPMD mengirimkan hasil verifikasi tersebut untuk diperbaiki lagi oleh desa

- f) Operator desa memperbaiki RAPBDes berdasarkan koreksi/ verifikasi oleh BPMD
- g) Operator desa mengirimkan kembali RAPBDes hasil perbaikan
- h) Operator BPMD memeriksa kembali RAPBDes yang telah diperbaiki oleh desa
- i) Bila hasil perbaikan RAPBDes yang telah dilakukan oleh desa sesuai dengan verifikasi maka BPMD akan menyetujui RAPBDes tersebut
- j) Operator Badan Keuangan Pemda Kab. Gorontalo mengambil data dari aplikasi, mana saja desa yang RAPBDesnya sudah disetujui oleh BPMD dan siap untuk dicairkan ADD.

Arsitektur sistem yang diusulkan untuk pemrosesan data uang masuk dan penggunaan keuangan desa, terlihat pada gambar 2



Gambar 2. Penggunaan keuangan desa

Keterangan gambar :

- a) Operator desa mengambil data RAPBDes dari aplikasi
- b) Operator desa menginput penerimaan dan penggunaan keuangan desa berdasarkan RAPBDes yang telah disetujui (RAPBDes yang telah disetujui tidak dapat diubah oleh pihak desa tanpa izin operator BPMD karena aplikasi sudah terproteksi otomatis), sehingga desa dalam pengelolaan keuangan desa sudah berdasarkan perencanaan yang telah dibuat saat pengajuan RAPBDes
- c) Operator BPMD dapat melihat RAPBDes yang diusulkan untuk diubah (perubahan harus sepengetahuan BPD dari desa tersebut)
- d) Operator BPMD melakukan perubahan RAPBDes sesuai dengan permohonan desa dan disetujui oleh BPD desa tersebut

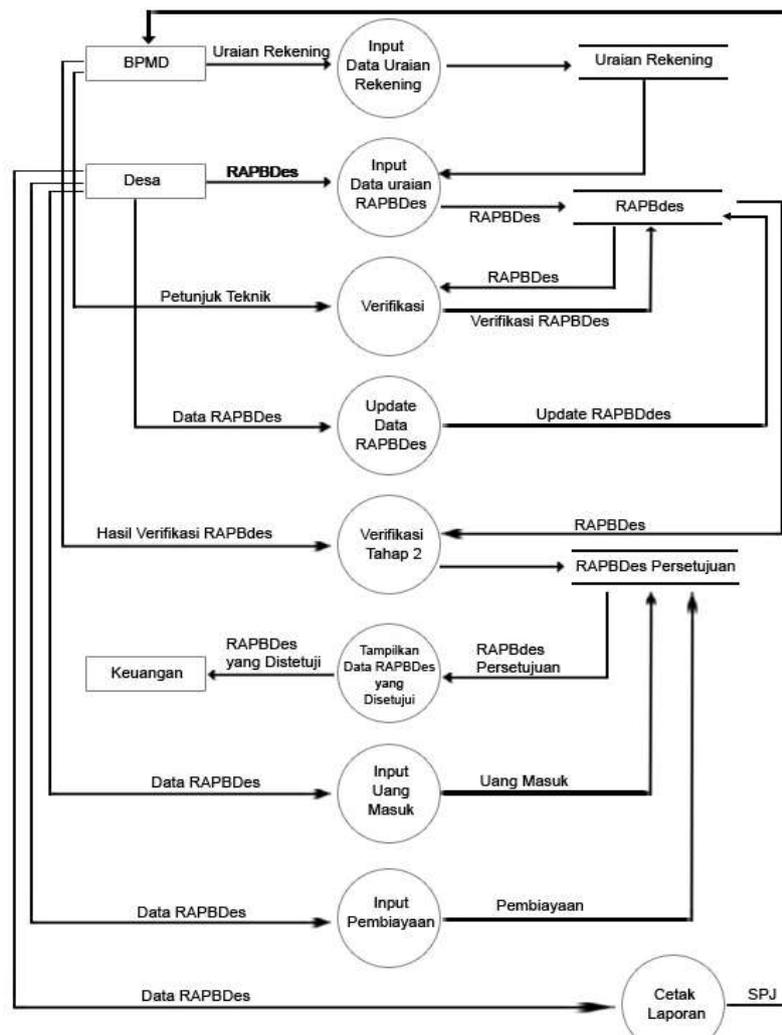
Rancangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan administrasi pertanggung jawaban keuangan desa untuk sistem yang baru adalah :

1. Operator Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) menginput data kode rekening dan uraian kegiatan
2. Hasil inputan kode rekening dan uraian kegiatan akan digunakan oleh Setiap kantor desa untuk memasukkan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap uraian kegiatan. Dalam kegiatan ini pihak desa membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang telah dibuat oleh desa akan dilakukan verifikasi secara online oleh pihak Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)

4. Hasil verifikasi akan diperbaiki lagi oleh desa kemudian diusulkan lagi ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)
5. Hasil perbaikan RAPBDes yang telah dilakukan oleh desa akan diverifikasi lagi oleh Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) untuk memastikan hasil koreksi/ verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya apakah sudah diperbaiki. Bila sudah diperbaiki maka Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) akan membuat berita acara hasil verifikasi yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan lainnya dari pemerintah daerah siap dicairkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
6. Untuk menggunakan/ membelajarkan uang tersebut pihak kantor desa harus menyesuaikan dengan usulan APBDes yang telah disetujui oleh Kantor BPMD. Pada sistem yang dibuat ini, pihak desa tidak dapat merubah uraian kegiatan dan besaran dana untuk setiap uraian tersebut karena telah terproteksi secara otomatis saat Pihak BPMD menyetujui APBDes. Melaporkan penggunaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 (Laporan buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu penerimaan, buku kas pembantu pengeluaran)

Gambar 3 menunjukkan DAD Level 0 sistem yang diusulkan tentang pengelolaan keuangan desa

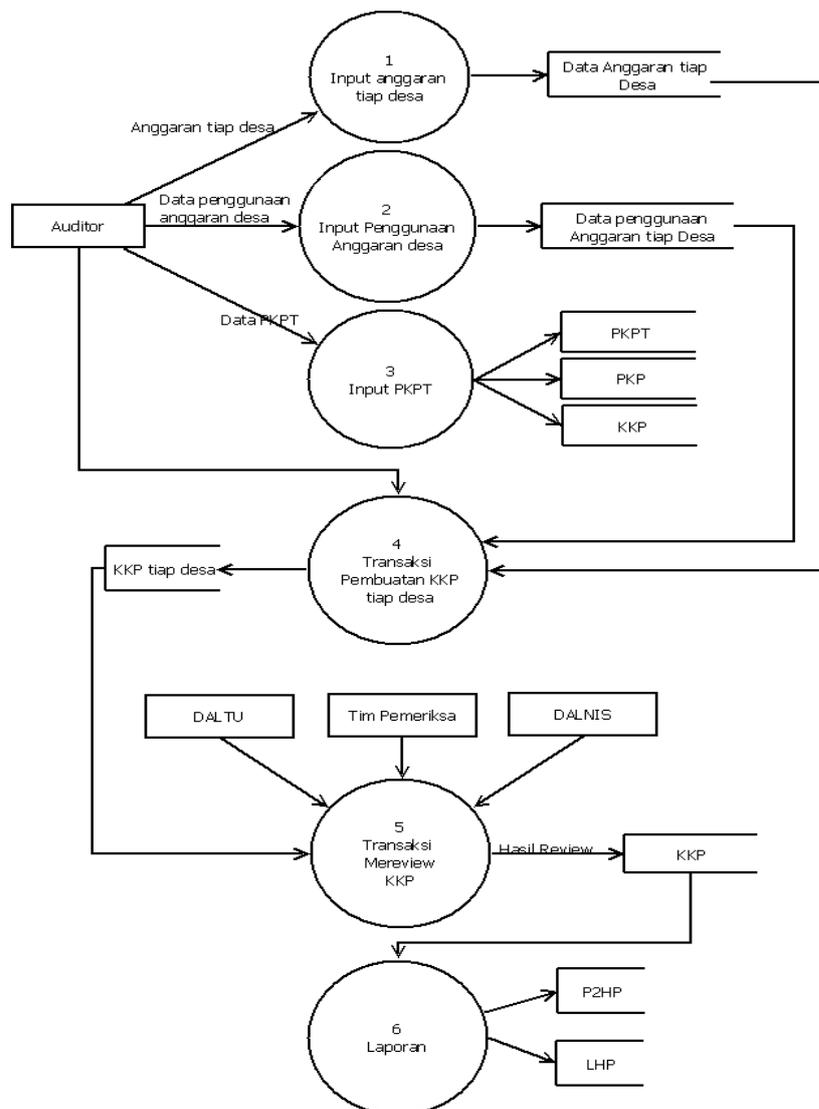


Gambar 3. DAD Level 0 usulan sistem pengelolaan keuangan desa

Rancangan Sistem Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Keuangan Desa

Proses audit dan tindak lanjut hasil audit keuangan desa ditunjukkan pada gambar 4 dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Pegawai Inspektorat dalam hal ini sebagai auditor memasukkan setiap data temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan form KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan).
- 2) Hasil inputan data oleh auditor akan direview oleh Ketua Tim Pemeriksa.
- 3) Hasil review KKP oleh Ketua Tim Pemeriksa akan direview lagi oleh DALNIS (Pengendali Teknis).
- 4) Hasil review KKP oleh DALNIS (Pengendali Teknis) akan direview lagi oleh DALTU (pengendali Mutu) – Kepala Inspektorat
- 5) Hasil akhir review KKP oleh Daltu akan menghasilkan P2HP (pokok-pokok Hasil Pemeriksaan) Kemudian P2HP akan dikirimkan kembali oleh auditor kepada Desa yang mendapatkan Temuan melalui sistem, dan Desa akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk menanggapi P2HP tersebut.
- 6) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan Desa tidak memberikan tanggapan terhadap P2HP yang diberikan maka Kepala Inspektorat melalui auditor akan mengeluarkan surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)



Gambar 4. DAD Level 0 proses audit dan tindak lanjut hasil audit keuangan desa

MODEL APLIKASI PENGELOLAAN DAN AUDIT KEUANGAN DESA

Implementasi Sistem Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Desa

Implementasi ini dimulai dari Kantor BPMD membuat kode rekening dan uraian, sehingga ada standarisasi RAPBDes yang dibuat setiap desa sama. Gambar 5 Menunjukkan form untuk membuat kode rekening dan uraian



The screenshot shows the 'Buat Item Anggaran tahun 2011' form. The header includes the application title and logo. The navigation menu contains 'Home', 'Anggaran Item', 'Proposal Status', 'Data', 'About', and 'Contact'. The profile section on the left shows 'Nama bpmid' and 'Jenis : bkmd'. The main content area displays a table with one row containing the number '1' and buttons for '+anak', '+saudara', 'hapus', and 'validasi'.

Gambar 5 form kode rekening dan uraian

Berdasarkan kode rekening dan uraian yang telah dibuat oleh Kantor BPMD maka desa sudah bisa membuat RAPBDes yang ditunjukkan pada gambar 6



The screenshot shows the 'Anggaran Item Level 5 Tahun 2012' form. The header includes the application title and logo. The navigation menu contains 'Home', 'Proposal', 'Laporan', 'About', and 'Contact'. The profile section on the left shows 'Nama pantungo' and 'Jenis : desa Pantungo'. The main content area displays a hierarchical list of budget items: '1 PENDAPATAN', '1.1.PENDAPATAN ASLI DESA', '1.1.1.Hasil Usaha Desa', '1.1.1.1.Hasil Usaha Desa', '1.1.2.Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa', '1.1.2.1.Tanah Kas Desa', '1.1.2.2.Pasar Desa', '1.1.2.3.Pasar Hewan', and '1.1.2.4.Tambahan Perahu'. Each item has a '+anak' button.

Gambar 6.Form RAPBDes

RAPBDes yang dibuat oleh desa kemudian dikoreksi/ diverifikasi oleh Kantor BPMD yang ditunjukkan pada gambar 7

Edit Anggaran Item Tahun 2012				
Nama Item	Nilai tahun ini	Tahun 2011	Tahun 2012	Koreksi
1. PENDAPATAN				
1.1. PENDAPATAN ASLI DESA				
1.1.1. Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1. Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1.1. Dividen dan usaha desa agro pntombulu		belum ada	0	
1.1.1.1.2. Bagi hasil usaha tabung desa		belum ada	0	
1.1.2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1. Tanah Kas Desa		belum ada	0	
1.1.2.2. Pasar Desa		belum ada	0	
1.1.2.3. Pasar Hewan		belum ada	0	
1.1.2.4. Tambakan Perahu		belum ada	0	
1.1.2.5. Bangunan Desa		belum ada	0	
1.1.2.6. Peternakan ikan yang dikelola Desa		belum ada	0	
1.1.2.7. Lain-Lain Kekayaan Milik Desa				
1.1.2.7.1. Hasil pendapatan pemijaman kursi milik desa		belum ada	0	
1.1.2.7.2. hasil pendapatan pemijaman gula kantor desa		belum ada	0	
1.1.2.7.3. Peminjaman tenda milik desa		belum ada	0	
1.1.3. Hasil Swadaya dan Partisipasi				
1.1.3.1. Hasil Swadaya dan Partisipasi				
1.1.3.1.1. Hasil swadaya dan partisipasi kegiatan piknik		belum ada	0	
1.1.3.1.2. Perayaan hari-hari besar islam		belum ada	0	
1.1.4. Hasil Gotong Royong				
1.1.4.1. Hasil gotong royong		belum ada	0	

Gambar 7 Verifikasi RAPBDes

Hasil verifikasi RAPBDes oleh Kantor BPMD akan di perbaiki lagi oleh desa kemudian oleh desa hasil perbaikan dikirim lagi ke Kantor BPMD untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya penggunaan keuangan desa. Untuk penggunaan keuangan desa maka admin desa mengklik laporan kemudian pilih edit kemudian klik item anggaran yang akan digunakan terlihat pada gambar 8 dan 9

The screenshot shows a web application interface. On the left, there is a 'Profile' section for a user named 'pantungo' from 'Desa Pantungo'. On the right, there is a 'Status Laporan Desa' section with a table showing a report for the year 2012, status 'belum_final', and an 'Edit Final' button. Below the table, there are dropdown menus for 'Buku Kas Umum' and 'Januari', and a 'Buat' button.

Gambar 8 Form laporan

The screenshot shows a 'Detail Item' form. It includes fields for 'No', 'tanggal', 'No Bukti', and 'Jumlah'. The 'Jumlah' field is set to '1000000' and is labeled 'Sisa anggaran'. There is a checkbox for 'Upload bukti?' and a 'Browse...' button. A 'Tambah' button is at the bottom left.

Gambar 9 form input data anggaran pendapatan

Implementasi Sistem Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Keuangan Desa

Penggunaan keuangan desa akan diaudit oleh Inspektorat, dimana pihak inspektorat akan menginput data hasil pemeriksaan melalui form Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Gambar 10 menunjukkan form untuk input data Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Gambar 10. Form KKP

Hasil inputan KKP kemudian akan direview oleh ketua tim, dalnis, dan daltu. Form review terlihat pada gambar 11. Pada tahap ini ketua tim, dalnis dan daltu diberikan hak untuk mengeliminasi hasil temuan dengan cara mengklik kotak yang tersedia pada temuan.

Gambar 11. Form Review

Setelah proses review maka desa akan menindak lanjuti hasil temuan yang dituangkan dalam bentuk P2HP. Adapun laporan akhir hasil review (dilakukan oleh Pengendali Mutu/ daltu) ditampilkan pada gambar 12 dan gambar 13 menunjukkan P2HP

LAPORAN HASIL REVIEW

Kertas Kerja Pemeriksaan

Tanggal 13/08/2014

Tingkat : Daltu

No	Nama Desa	Hasil Pemeriksaan	Ket
1	dudanas	terdapat atau tidak adanya kwitansi pembelian komputer	
2	dudanas	Kwitansi pembayaran listrik rumah tidak disertai bukti pembayaran pajak	Ditiriskan Ketua Tim
3	byrongo	Kelebihan pembayaran tunjangan jabatan kepala desa	

Reviewer
(Daltu)

Dr. Abi Manaf Duggo, M.Si
NIP. 197302261992031

Gambar 12. Laporan akhir hasil review

Desa Lihat PPHP tahun 2012 Kecamatan Telaga

[terima](#)

1. Tambah Paragraf hapus

Bagian Keuangan

+kol	+bar	Nama Desa	edit	+kol	-kol	Bukti Kurang Lengkap	edit	+kol	-kol	Kelebihan Pembayaran Tunjangan
		mongoloto	edit			200000	edit			
		Bulile	edit				edit			20000

desa	Tanggapan	Bukti	Inspektorat
mongoloto	Ini bukti yang diminta	Lihat Gambar	<input checked="" type="checkbox"/> Batal Ke LHP OK Batal ke LHP Kirim tanggapan
Bulile		Tidak ada	<input type="checkbox"/> Batal Ke LHP Kirim tanggapan

Gambar 13. Laporan P2HP

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Aplikasi yang dibangun dapat digunakan untuk perencanaan dan penggunaan keuangan, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak desa dalam pengelolaan keuangan
- 2) Aplikasi yang dibangun dapat melakukan audit keuangan desa sehingga dapat digunakan untuk mempercepat proses pemeriksaan penggunaan keuangan desa.

Saran

Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam sistem ini. Penulis menyarankan beberapa hal untuk penelitian selanjutnya baik bagi individu, organisasi, instansi pemerintahan yang akan mengimplementasikan model audit berbasis teknologi informasi

1. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait dengan penelitian ini. Penelitian lanjutan tersebut lebih di fokuskan pada keamanan data
2. Saat mengimplmentasikan aplikasi ini, diusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar dapat mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur pendukung dan sumber daya lainnya yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Subroto. A, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”, *Tesis*, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- [2] Solekhan. M, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas”, Malang:Setara Press, 2012
- [3] Sumpeno. W, “Perencanaan Desa Terpadu”, Banda Aceh: Read, 2011
Permendagri No.37, “Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”,
<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/archieve/peraturan-menteri/tahun/2007>, 2009

Lampiran 3. Instrumen penelitian

Alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti adalah wawancara dan observasi, dimana kegiatan wawancara digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana proses pengelolaan dan pemeriksaan penggunaan keuangan desa. Observasi digunakan untuk mengamati seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa maupun oleh inspektorat dalam hal pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Instrumen penelitian dibuat/ disusun dengan beberapa tahapan, yakni mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti, menjabarkan variabel ke dalam metode pengumpulan data, mencari indikator keberhasilan dari setiap variabel, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen.

A. Mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti

Pada tahap ini peneliti melaksanakan rapat personalia untuk menentukan focus dari variabel yang akan diteliti dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data. Hasil yang diperoleh pada tahapan ini adalah terciptanya metode pengumpulan data yang akan digunakan, daftar desa yang akan dikunjungi sebagai sampel pengumpulan data, pembagian tugas saat akan melakukan survei dan melakukan identifikasi kebutuhan awal (peralatan yang dibutuhkan saat melakukan penelitian) sebelum turun lapangan. Pada kegiatan ini akan dibicarakan peran masing-masing anggota peneliti dalam menjalankan proses penelitian.

B. Menjabarkan variabel ke dalam metode pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti merumuskan data apa saja yang akan diambil menggunakan wawancara maupun observasi.

1. Wawancara, metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang :
 - Model/ mekanisme pemeriksaan keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo
 - Cara mereview hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan DALTU (pengendali Mutu)
 - Hal-hal yang perlu disiapkan oleh desa dalam proses pemeriksaan
 - Pembuatan laporan tindak lanjut oleh desa
 - Dokumen pertanggung jawaban keuangan desa

- wawancara dengan auditor tentang proses penanganan dokumen tindak lanjut atas temuannya
2. Observasi, metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang :
- Cara pembuatan PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan) dan PKP (Program Kerja Pemeriksaan) oleh inpektorat
 - Cara mereview hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan DALTU (pengendali Mutu)
 - Cara pembuatan PPHP (Pokok-pokok hasil pemeriksaan)
 - Cara pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

C. Mencari indikator keberhasilan dari setiap variable

- Model/ mekanisme pemeriksaan keuangan desa yang ada dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Indikator keberhasilan adalah : Mendapatkan informasi tentang sistem yang berjalan untuk proses pemeriksaan keuangan desa
- Cara mereview hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan DALTU (pengendali Mutu). Indikator keberhasilan adalah : proses review oleh pemeriksa
- Hal-hal yang perlu disiapkan oleh desa dalam proses pemeriksaan. Indikator keberhasilan adalah : tahapan dalam mempersiapkan pemeriksaan penggunaan keuangan oleh desa dan hal-hal biasanya menjadikan temuan atas pengelolaan keuangan desa serta PPHP
- Pembuatan laporan tindak lanjut oleh desa. Indikator keberhasilan adalah : diperolehnya dokumen tindak lanjut dari desa
- Dokumen pertanggung jawaban keuangan desa. Indikator keberhasilan adalah : diperolehnya dokumen pertanggung jawaban keuangan desa
- wawancara dengan auditor tentang proses penanganan dokumen tindak lanjut atas temuannya. Indikator keberhasilan adalah : proses pencocokan/ pemeriksaan bukti pengeluaran dan temuan
- Cara pembuatan PKPT (Program Kerja Pemeriksa Tahunan) dan PKP (Program Kerja Pemeriksaan) oleh inpektorat. Indikator keberhasilan adalah : Dokumen PKPT tahun 2014 dan PKP

- Cara mereview hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan DALTU (pengendali Mutu). Indikator keberhasilan adalah : proses review oleh pemeriksa
- Cara pembuatan PPHP (Pokok-pokok hasil pemeriksaan). Indikator keberhasilan adalah : mekanisme dan proses pembuatan PPHP
- Cara pembuatan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Indikator keberhasilan adalah : mekanisme dan proses pembuatan LHP

D. Merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrument

Pertanyaan yang dibuat oleh peneliti digunakan saat wawancara. Pertanyaan lebih difokuskan untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme pengelolaan dan audit keuangan desa yang ada saat ini, dengan tujuan untuk menemukan kelemahan/kekurangan yang ada pada system yang berjalan, sehingga dapat dibuatkan system yang baru.

- Pertanyaan saat wawancara model/ mekanisme pemeriksaan keuangan desa yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo
 1. Apa saja yang harus disiapkan oleh pihak inspektorat sebelum melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh setiap desa ?
 2. Bagaimana proses pencatatan atas temuan pengelolaan keuangan desa oleh inspektorat?
 3. Setelah ditemukan bahwa sebuah desa terdapat temuan atas pengelolaan keuangan desa, temuan tersebut langsung ditindaklanjuti?
 4. Apa yang harus dilakukan oleh inspektorat dan bagaimana apabila temuan yang ada pada suatu desa tidak di tindak lanjuti?
 5. Bagaimana proses penyimpanan hasil temuan oleh inspektorat ?
 6. Apa kesulitan yang dihadapi oleh inspektorat dalam mencari file/ dokumen hasil temuan?
 7. Apakah dokumen temuan setiap tahunnya masih tersimpan dan mudah dicari?
- Pertanyaan cara mereview hasil audit oleh ketua tim, DALNIS (Pengendali Teknis), dan DALTU (pengendali Mutu)
 1. Bagaimana proses review hasil audit oleh inspektorat?
 2. Apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pelaksana pemeriksa keuangan desa?

3. Apakah hasil review akhir masih bisa dibatalkan atau langsung ditindak lanjuti?
 4. Hal-hal apa saja yang menjadikan sebuah temuan bisa dihilangkan?
 5. Apa yang dilakukan setelah proses review?
- Pertanyaan tentang hal-hal yang perlu disiapkan oleh desa dalam proses pemeriksaan
 1. Apa saja yang harus disiapkan oleh setiap desa dalam menghadapi pemeriksaan oleh pihak inspektorat?
 2. Bagaimana cara mempersiapkannya?
 3. Siapa saja pegawai didesa yang akan diperiksa?
 4. Bagaimana cara pegawai menghadapi proses pemeriksaan?
 - Pertanyaan tentang pembuatan laporan tindak lanjut oleh desa
 1. Ada berapa model laporan tindak lanjut yang akan dikirimkan kedesa?
 2. Bagaimana penyimpanan dokumen tersebut?
 - Pertanyaan tentang dokumen pertanggung jawaban keuangan desa
 1. Bagaimana model dokumen pertanggungjawaban keuangan desa?
 2. Bagaimana cara penyimpanan dokumen hasil pengelolaan keuangan desa?
 - Pertanyaan kepada auditor tentang proses penanganan dokumen tindak lanjut atas temuannya
 1. Ada berapa kategori auditor dan apa tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kategori tersebut?
 2. Siapa saja yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan?
 3. Bagaimana menyatukan hasil pemeriksaan, sehingga menjadi sebuah dokumen hasil pemeriksaan?
 4. Bagaimana auditor menangani dokumen hasil pemeriksaan?
 5. Bagaimana cara mengorganisir dokumen tersebut?